

## BAB II

### IMPLEMENTASI PROGRAM

#### A. PERLUASAN KESEMPATAN BAGI SEMUA

Indonesia, sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) turut menyepakati komitmen dunia untuk menyelenggarakan program *Education for All* (EFA) atau Pendidikan untuk Semua. Komitmen dunia itu telah dikumandangkan pada konferensi dunia di Jomtien, Thailand, pada 1990. Namun baru dideklarasikan sebagai sebuah gerakan dunia pada pertemuan di Dakar, Senegal, pada 26-28 April 2000. *The Dakar Framework for Action* berisikan enam tujuan utama: 1) Memperluas pendidikan untuk anak usia dini; 2) Menuntaskan wajib belajar untuk semua (2015); 3) Mengembangkan proses pembelajaran/keahlian untuk orang muda dan dewasa; 4) Meningkatnya 50% orang dewasa yang melek huruf (2015), khususnya perempuan; 5) Meningkatkan mutu pendidikan; dan 6) Menghapuskan kesenjangan gender.

Target pencapaian EFA pada 2015 itu kemudian disepakati untuk dipercepat. Komitmen mempercepat target EFA digaungkan *E-9 Ministerial Review Meeting on Education for All* atau para menteri pendidikan dari sembilan negara berpenduduk terbesar dunia, pada pertemuan di Denpasar, Bali, 12 Maret 2008. Anggota E-9 adalah negara dengan jumlah penduduk sekitar 60% populasi dunia. Selain Indonesia, anggota E-9 adalah Bangladesh, Brazil, Cina, Mesir, India, Meksiko, Nigeria, dan Pakistan.

Indonesia merasa berpentingan menandatangani konvensi tersebut untuk memperkuat komitmen bersama sebagai bangsa dalam memenuhi hak-hak setiap anak memperoleh pendidikan. Upaya mencapai target EFA merupakan bagian dari upaya pembangunan pendidikan nasional secara keseluruhan. Sudah banyak yang dapat dicapai dalam pembangunan pendidikan sejak kemerdekaan. Tapi juga besar pekerjaan rumah dan tantangan era sekarang dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang unggul untuk pembangunan.

Pembangunan pendidikan makin disadari sebagai sektor yang strategis untuk menunjang pembangunan sektor secara keseluruhan. Berbagai sektor pembangunan memerankan manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Oleh karenanya, pembangunan pendidikan harus sensitif dan tanggap terhadap dinamika pembangunan sektor-sektor lainnya.

Krisis moneter pada tahun 1997, yang berimbas pada krisis perekonomian yang berkepanjangan, berdampak luas pada pembangunan nasional Indonesia. Pemerintah sulit mendorong sektor riil untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dana pembangunan tersedot untuk mengatasi masalah keuangan dan moneter. Pertumbuhan ekonomi bahkan sempat negatif, dan bergerak lamban selama beberapa tahun kemudian. Pada 1998, tercatat pertumbuhan ekonomi mencapai titik paling rendah minus 13,1%. Setahun kemudian, pada 1999, pertumbuhan kembali positif, namun hanya 0,8 %, setelah Indonesia menerima skenario bantuan asing melalui IMF.

Keadaan ekonomi yang sulit itu mengalami kondisi yang makin buruk dengan terjadinya krisis politik dan sosial yang cukup panjang. Pada akhirnya Indonesia mampu menggulirkan reformasi politik melalui demokratisasi pergantian kepemimpinan nasional dan perubahan sistem legislatif. Pada dua periode kepemimpinan nasional pada masa awal reformasi (1999-2004), pertumbuhan ekonomi mulai bergerak naik hingga mencapai 4,1% pada tahun 2003.

Dampak krisis di subsektor ketenagakerjaan sempat melambungkan jumlah pengangguran terbuka yang mencapai 6,4 persen pada tahun 1999. Bahkan angka pengangguran merangkak naik menjadi 9,1 persen pada tahun 2002. Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran terbuka menurun menjadi 6,7 persen (10,2 juta orang) pada tahun 2004.

Walaupun secara umum situasinya membaik, namun stabilitas ekonomi dan kemapanannya untuk terus bergerak naik masih dipertanyakan. Angka pengangguran hingga 2005 malah bertambah

menjadi 10,9 juta orang. Yang lebih menjadi keprihatinan adalah angka pengangguran terselubung yang mencapai jumlah besar, yaitu 35% pada tahun 2002. Indikasi masalah tersebut tercermin dari menurunnya daya serap pasar kerja. Tercatat lapangan kerja bergaji, menurun dari 35,5% (1997) menjadi 33,3% (2002). Lapangan kerja sektor manufaktur menurun dari 2,8 persen (periode 1994-1997) menjadi 0,6 persen (periode 1998-2001).

Dengan makin sulitnya lapangan kerja, angkatan kerja cenderung mencoba bertahan hidup melalui sektor informal. Hal ini ditandai dengan jumlah pekerja sektor informal yang cenderung terus meningkat sejak krisis. Pada tahun 2001 pekerja informal berjumlah 58,5 juta, 23,4 juta di antaranya adalah kaum perempuan. Pangsa lapangan kerja di sektor pertanian meningkat dari 40,1% (1997) menjadi 43,3% (2001).

Kaitannya dengan Kerangka Aksi Dakar Pendidikan untuk Semua, seluruh negara yang menandatangani deklarasi, termasuk Indonesia, berupaya memegang komitmen memperluas dan memperbaiki pendidikan. Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional Pendidikan Untuk Semua (RAN-PUS), yang dijabarkan ke dalam Rancangan Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD-PUS) pada semua provinsi dan sebagian besar kabupaten/kota.

Sebagian dari komitmen menjalankan Pendidikan untuk Semua, pemerintah mencanangkan penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Wajar Dikdas 9 Tahun mencakup jenjang pendidikan SD/MI/pendidikan setara dan SMP/MTs/pendidikan setara. Program ini secara resmi dicanangkan Presiden Soeharto pada tanggal 2 Mei 1994. Saat itu, Presiden Soeharto menargetkan program tersebut tuntas pada tahun 2004, dengan indikator utama berupa angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/pendidikan setara minimal 95%. Pada tahun 2004, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar 94,12% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 81,22%. Hantaman krisis ekonomi yang merangsek sejak akhir tahun 1997 itu, membuat target direvisi menjadi akhir tahun

2008. Keputusan menjadwalkan ulang itu dilakukan pada tahun 2000, saat Abdurrahman Wahid menjabat Presiden RI.

Di bawah Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, target berhasil diwujudkan. APK SMP/MTs sudah mencapai 93,79% pada Agustus 2007. Selain tuntas dari sisi kuantitas, Departemen Pendidikan Nasional juga berupaya keras program Wajar Dikdas tersebut berkualitas.

Terobosan penting pemerintah dalam pembangunan pendidikan adalah kebijakan mengenai pendanaan pendidikan. Lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjadi bagian penting reformasi pendanaan pendidikan nasional. UU Sisdiknas mengamanahkan pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan UU Guru dan Dosen yang mengamanahkan pemenuhan standar kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, disertai peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

Keseriusan Pemerintah yang didukung oleh DPR RI untuk memenuhi anggaran pendidikan dapat dilihat dari upaya untuk mengalokasikan anggaran pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan mencapai 20% pada APBN 2009 sebagaimana diamanahkan UU Sisdiknas.

Tabel Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBN 2003-2008

Tahun	Anggaran pendidikan	Prosentase terhadap APBN
2003	Rp 13,6 triliun	4,15%
2004	Rp 20,5 triliun	5,5%
2005	Rp 24,6 triliun	8,1%
2006	Rp 36,7 triliun	9,1%

2007	Rp 43,5 triliun	11,8%
2008	Rp 48,4 triliun	9,8%

## 1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Program terobosan pendanaan kaitannya dengan perluasan akses pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), dan beasiswa. Program BOS diberikan untuk satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar, yakni SD/MI dan pendidikan setara, baik negeri maupun swasta, sedangkan BKM diberikan untuk jenjang pendidikan menengah. Beasiswa diberikan kepada siswa berprestasi dan siswa miskin, dari jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.

Kebijakan pendanaan pendidikan pada tahun 2007 ini merupakan kelanjutan dari program-program pendanaan pendidikan yang telah dilaksanakan pada tahun 2005 dan 2006. Program-program pendanaan pendidikan itu diteruskan karena menunjukkan hasil yang signifikan.

Biaya satuan program-program pendanaan pendidikan itu meningkat dibanding tahun 2005 dan 2006. Misalnya *unit cost* BOS 2007 untuk SD/MI yang semula Rp 235.000/siswa pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp 254.000/siswa. Sedangkan *unit cost* BOS untuk tingkat SMP/MTs dari Rp 324.500/siswa pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp 354.000/siswa. Total dana BOS 2007 mencapai Rp 9.840.898.914.000.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan pengembangan lebih lanjut dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan, yang dilaksanakan pemerintah pada kurun 1998-2003, dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM yang dilaksanakan kurun 2003-2005.

Tahun 2007 manajemen BOS dipisah antara sekolah-sekolah umum Depdiknas dengan madrasah milik Departemen Agama (Depag). Depdiknas hanya menyalurkan dana BOS kepada SD dan SMP, sedangkan Depag menyalurkan kepada MI dan MTs.

Teknis penyaluran BOS dirancang dengan menghilangkan kemungkinan kebocoran. Dana dari Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN) disalurkan ke provinsi, lalu diteruskan ke sekolah melalui bank atau kantor pos penyalur.

Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas mencatat dampak positif penyaluran BOS 2007 sbb:

1. Program BOS mengurangi beban orangtua untuk biaya pendidikan anak. Program BOS terbukti meningkatkan jumlah siswa yang terbebas dari iuran/pungutan sekolah/madrasah dari 28,4% menjadi 70,3%.
2. Program BOS menurunkan angka *dropout* (DO) atau putus sekolah, ketidakhadiran, dan angka mengulang kelas, serta peningkatan angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs.
3. Penyelenggaraan program BOS pada tahun 2007 relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun 2006 dilihat dari aspek perencanaan dan pengorganisasian, sosialisasi program, penyaluran dana dan pemanfaatan dana, serta monitoring evaluasi dan pelaporan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kelemahan yaitu pengadaan buku pedoman yang kurang efisien, waktu penyampaian buku pedoman, sosialisasi, dan penyaluran dana yang sering terlambat, serta ketidaksesuaian data pengalokasian dana dengan jumlah siswa di sekolah.
4. Memberikan Bantuan Operasional Lembaga (BOL) kepada 1.000 lembaga kursus yang sekurang-kurangnya menjangkau 20.000 orang serta memberikan BOL pada 2.000 PKBM untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan PKBM sehingga mampu mengembangkan berbagai program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya.

## **2. Beasiswa untuk siswa berprestasi dan siswa miskin**

Beasiswa untuk siswa berprestasi diberikan kepada siswa jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dengan target dan biaya satuan yang lebih besar. Total dana beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi untuk tahun 2007 mencapai Rp 76.451.133.000.

Tahun 2007, beasiswa untuk siswa miskin hanya diberikan kepada siswa SMA/SMK miskin yang besarnya mencapai Rp 244.138.674.000, dan beasiswa mahasiswa miskin. Selain dalam bentuk beasiswa, pemerintah memberikan bantuan belajar untuk mahasiswa miskin, bantuan tugas belajar dan penyingkiran calon mahasiswa.

### **B. PENINGKATAN MUTU**

Indikator utama kualitas Wajar Dikdas 9 Tahun bisa dilihat dari nilai rata-rata ujian nasional (UN) SMP/MTs yang ditargetkan mencapai 7,0. Pada UN tahun 2007, nilai UN SMP/MTs telah mencapai 7,05. Namun, penilaian mutu pendidikan Indonesia dibandingkan negara-negara di kancah Asia dan Asia Tenggara sekalipun belum bisa dibanggakan. Misalnya hasil survei *Trends in International Mathematics and Science Survey* (TIMSS). Survei TIMSS meneliti kemampuan anak-anak usia 13 tahun dalam bidang matematika dan sains.

Pada survei TIMSS tahun 2003 yang diikuti 46 negara, siswa-siswa Indonesia menempati urutan 34 untuk matematika, dan 36 untuk sains. Singapura menempati urutan pertama untuk dua-duanya. Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Jepang, juga mendominasi peringkat atas. Sementara Malaysia urutan 10 untuk matematika, dan 20 untuk sains.

Hasil hampir serupa, kualitas pelajar Indonesia yang masih rendah dapat terlihat pada studi yang dilakukan PISA (*Programme for International Student Assessment*) pada 2003. Objek surveinya pelajar berusia 15 tahun di 41 negara. Ada tiga aspek yang diteliti PISA, yakni kemampuan

membaca, matematika, dan sains. Dalam kemampuan membaca dan matematika, siswa-siswa Indonesia menempati urutan ke 39. Sementara untuk sains, menduduki peringkat ke- 38. Upaya peningkatan mutu dilakukan dalam berbagai terobosan.

## **1. Pembangunan Prasarana dan Sarana**

Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang telah dilakukan adalah perbaikan sekolah rusak, penyediaan alat peraga, perpustakaan, hingga pengadaan buku pelajaran dalam jumlah besar-besaran. Prasarana yang dibangun pemerintah adalah unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium komputer, laboratorium bahasa,

### **Unit Sekolah Baru**

Program USB merupakan kelanjutan dari program pembangunan Unit Gedung Baru (UGB). Meski sebagai program kelanjutan tapi ada beberapa perbedaan. UGB hanya membangun gedung saja. Sedangkan USB tak hanya bangunan tapi juga sarana dan prasarana pendukung seperti pengajar dan tata usaha. Pembangunan USB sudah lengkap meliputi sarana dan prasarana penunjang. Berbeda dengan masa lalu, pembangunan UGB seringkali terjadi hanya tersedia seorang guru untuk satu sekolah. Satu-satunya guru itupun harus merangkap sekaligus sebagai, tenaga tata usaha dan kepala sekolah.

Program pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dilakukan di daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan. Suatu daerah dianggap layak dan membutuhkan didasarkan pada kebutuhan obyektif daerah bersangkutan. Lokasi pembangunan USB berada di daerah-daerah terpencil, pedesaan, terisolir dan daerah yang termasuk kantong kemiskinan.

Selain pembangunan gedung SMP/MTS juga dibangun gedung SMA. Pembangunan unit sekolah baru SMA bertujuan untuk memenuhi

kekurangan sarana dan prasarana dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh kesempatan belajar bagi anak usia 16–18 tahun.

### **Ruang Kelas Baru**

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) merupakan upaya lain yang dilakukan dalam rangka memperluas kesempatan belajar. Mekanisme subsidi dipakai dalam membangun RKB. Subsidi tersebut diberikan kepada sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta yang membutuhkan sesuai dengan kondisi obyektif yang bersangkutan. Dalam pembangunan ruang kelas baru tidak ada perbedaan antara negeri dan swasta.

Pola pelaksanaan pembangunan RKB adalah dengan metode imbal swadaya dan blockgrant. Artinya bagi sekolah yang tergolong mampu sistem yang digunakan adalah imbal swadaya. Sedangkan sekolah tidak mampu menggunakan pola *block grant*.

### **Perpustakaan Sekolah**

Kondisi perpustakaan sekolah umumnya belum memadai, baik ukuran luasnya maupun fasilitasnya. Banyak perpustakaan sekolah yang luasnya sama dengan ruang belajar, tidak memiliki kursi dan meja baca yang layak. Bahkan ada yang disaturuankan dengan organisasi lain.

Jumlah perpustakaan juga masih sangat minim. Di jenjang sekolah dasar, hanya 27,6% sekolah dasar memiliki perpustakaan. Sebarannya juga tidak merata di setiap provinsi. Data 2007, mencatat di Yogyakarta, terdapat 72,8% sekolah dasar yang memiliki perpustakaan sedangkan di Maluku Utara hanya 5% yang memiliki perpustakaan sekolah. Saat ini telah disahkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, 2 Oktober lalu.

Keberadaan perpustakaan sekolah merupakan hal yang mutlak. Sebab di dunia pendidikan, perpustakaan sekolah merupakan jantungnya

informasi yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pendidikan. Perpustakaan merupakan sumber belajar yang sangat penting, dan bertugas sebagai media penyampai publikasi kekayaan intelektual dan sarana pendukung kegiatan pendidikan.

Untuk meningkatkan jumlah perpustakaan telah dilaksanakan pembangunan ruang perpustakaan bagi SMP sebanyak 850 ruang di tahun 2006, dan 1.110 ruang pada tahun 2007. Dana yang dianggarkan untuk program ini sejumlah Rp. 68.570.000.000. Tabel di bawah ini menunjukkan pembangunan perpustakaan selama kurun 2005-2007.

### **Laboratorium IPA**

Tahun 2007 ini pembangunan SMP difokuskan pada penyediaan ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium IPA. Untuk tingkat SMP membangun Laboratorium sebanyak 900 ruang di tahun 2007 dan 549 di tahun 2006. Pembangunan ruang laboratorium ini dianggarkan sejumlah Rp 82.800.000.000.

Sedangkan untuk tingkat SMA telah dibangun laboratorium sejumlah 609 paket di tahun 2006 dan 512 paket di tahun 2007. Dana yang dianggarkan sejumlah Rp 79.574.266.000.

### **Laboratorium Komputer**

Saat ini penguasaan teknologi saat ini dianggap sangat penting. Apalagi jika dihubungkan dengan masalah kualitas. Salah satu yang dianggap penting adalah penguasaan akan teknologi komputer. Untuk mewujudkan hal tersebut Depdiknas memprogramkan pembangunan laboratorium komputer data pada awal tahun 2007 menunjukkan dari 23.586 sekolah SMP negeri dan swasta yang ada saat ini terdapat 5.220 laboratorium komputer. Berarti masih banyak sekolah yang belum memiliki laboratorium komputer.

### Laboratorium Bahasa

Penuntasan wajib belajar (wajib) pendidikan dasar 9 tahun perlu didukung penyediaan sarana laboratorium salah satunya adalah laboratorium bahasa. Sarana ini mutlak diperlukan agar mutu wajar juga menjadi prioritas seiring dengan pemerataan akses pendidikan.

Penyediaan laboratorium bahasa akan mampu menunjang peningkatan mutu pendidikan pada umumnya dan wajar dikdas 9 tahun pada khususnya. Hingga awal tahun 2007 dari 23.586 sekolah SMP negeri dan swasta yang ada saat ini, baru terdapat 1.922 laboratorium bahasa.

Dengan kondisi yang ada tersebut Depdiknas membangun 806 ruang perpustakaan baru di tahun 2007. Pembangunan ini dana yang dianggarkan sejumlah Rp 74.152.000. Tahun sebelumnya, 2006, telah dibangun 33 ruang perpustakaan.

Tabel Pembangunan Prasarana Sekolah (2005-2007)

Program	2005	2006	2007	Kumulatif
Unit Sekolah Negeri Baru	637	697	1018	2.352
- TK	184	219	236	639
- SMP	300	466	590	1356
- SMA	101	90	21	212
- SMK	46	65	140	251
- SLB	-	-	36	36
Ruang Kelas Baru	11.505	13.982	13.642	39.129
- SMP	8933	11408	10000	30341
- SMA	2.284	2388	1572	6244
- SMK	174	93	2000	2267
- SLB	114	93	70	337
Perpustakaan Sekolah	415	1.279	2.343	3.329
- SD	148	176	602	926
- SMP	50	450	1110	1610
- SMA	217	871	442	1530

- SMK	-	-	157	157
- SLB	-	-	32	32
Laboratorium IPA	1.114	946	1.444	3.504
- SMP	50	337	900	1287
- SMA	1.064	2.011	512	1121
- SLB			32	32
Laboratorium Komputer	452	241	1.433	2.126
- SMP	-	-	750	750
- SMA	452	435	341	1.228
- SLB			342	342
- SMP	50	-	806	856
- SMA	-	102	-	102

## 2. Rehabilitasi Prasarana dan Sarana

Kebutuhan akan program rehabilitasi sekolah disebabkan oleh dua faktor utama: buruknya konstruksi awal gedung sekolah dan kurangnya pemeliharaan yang memadai setelah konstruksi.

Program	2005	2006	2007	Kumulatif
Rehabilitasi Ruang Kelas SD/MI (DAK dan Dekon)	71160	63473	82480	217113
Rehabilitasi Ruang Kelas SMP/MTs	8475	4716	8978	22169
Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK	309	309	1740	2358
Rehabilitasi Ruang Kelas SLB	180	54	206	440
Rehabilitasi Sekolah Pasca Bencana (paket)	284	1132	1495	2627

## **Rehabilitasi Ruang Kelas SD/ MI**

Kondisi sekolah rusak merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi sekolah dasar. Pemerintah berkomitmen tidak boleh lagi ada anak yang kesulitan bersekolah, atau merasa terancam lantaran sekolahnya mau roboh.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan yang bersumber dari APBN dialokasikan untuk daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK pendidikan yang mulai hadir sejak tahun 2003, penyalurannya langsung ke rekening sekolah, atau yang selama ini sering dikenal dengan pola hibah (*block grant*). Pada tiga tahun pertama, 2003-2005, penggunaan DAK lebih dititikberatkan pada renovasi gedung SD dan perlengkapan mebelair. Sedangkan pada tahun keempat (2006), DAK juga diperuntukkan bagi peningkatan mutu pendidikan.

Meski ada DAK pendidikan, program rehabilitasi sekolah juga melibatkan pemerintah daerah. Biaya perbaikan sekolah ditanggung pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pola perbadingannya, pusat 50%, provinsi 30%, dan kabupaten/kota 20% dari total dana yang diperlukan. Untuk daerah dengan pendapatan relatif rendah, pola berbagi pembiayaan disepakati menjadi pusat 60%, provinsi 20% dan kabupaten/kota 20%.

Sasaran rehabilitasi sekolah menjangkau semua provinsi dan 434 kabupaten/kota. Prinsip-prinsip pelaksanaan rehabilitasi sekolah dilaksanakan secara swakelola. Artinya, tidak menggunakan sistem kontraktual seperti pola lama, melainkan lebih melibatkan partisipasi masyarakat melalui komite sekolah, sehingga penggunaan dana lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara lebih rinci mulai dari tahun 2003 dengan menghabiskan biaya Rp 625 miliar dialokasikan ke 287 kabupaten/kota untuk membangun 6908 sekolah dan jumlah kelas yang diperbaiki 27.632. Pada tahun 2004 dana sejumlah 652,6 miliar dialokasikan ke 302 kabupaten/kota untuk membangun 7215 sekolah dan jumlah kelas yang diperbaiki 36.075. Pada

tahun 2005 dana sejumlah 1.221 miliar dialokasikan ke 302 kabupaten/kota untuk membangun 13.567 sekolah dan jumlah kelas yang diperbaiki 67.835.

Pada tahun 2006 dana sejumlah 2.919,525 miliar dialokasikan ke 434 kab/kota untuk membangun 14.589 sekolah dan jumlah kelas yang diperbaiki 43.767. Sedangkan untuk tahun 2007 dana sejumlah 17.578 miliar dialokasikan ke 434 kab/kota untuk membangun 14.589 sekolah dan jumlah kelas yang diperbaiki 70.315.

Data 2003 mencatat ruang kelas rusak berat dan sedang sebanyak 531.186, kurang lebih 53% dari total ruang kelas sekolah sekuruh Indonesia. Antara 2003- 2007 jumlah ruang kelas SD-MI yang telah direhabilitasi menggunakan DAK Pendidikan mencapai 245.624 atau sekitar 24%. Jika ditambah dengan hasil rehabilitasi yang didanai nonDAK berjumlah 53.633 atau 5%. Total rehabilitasi ruang kelas, mencapai 29%. Sisanya, sekitar 24% ditargetkan selesai pada tahun 2008.

### **Rehabilitasi Ruang Kelas SMP/MTS**

Tahun 2006 tercatat jumlah ruang kelas sejumlah 184.707 ruang. Dari jumlah tersebut yang mengalami rusak berat 3.694 ruang atau sekitar 2%. Sedangkan yang mengalami rusak sedang 25.859 ruang atau 14%.

Rehabilitasi Ruang Kelas SMP yang sudah dilaksanakan pada tahun 2005 sebanyak 8.475 ruang kelas. Pada tahun 2006 sebanyak 4716 ruang kelas. Pada tahun 2007 sebanyak 8978 ruang kelas. Sehingga jumlah total ruang kelas SMP yang telah direhabilitasi sampai dengan Desember 2007 sebanyak 22.169 ruang kelas.

### **Rehabilitasi SMA/SMK**

Rehabilitasi Ruang Kelas SMA pada tahun 2006 sebanyak 450 ruang, sedangkan tahun 2007 1.040 ruang dana yang dianggarkan sejumlah Rp 57.696.165.000. Untuk SMK Rehabilitasi Ruang Kelas SMA pada tahun 2006 sebanyak 325 ruang ruang, sedangkan tahun 2007, 700 ruang dana yang dianggarkan sejumlah Rp 54.572.976.000.

## **Rehabilitasi Sekolah Pasca Bencana**

Kerusakan gedung sekolah selalu terjadi saat ada bencana di berbagai tempat di Indonesia. Kerusakan gedung sekolah tersebut mengakibatkan terganggunya kegiatan belajar mengajar untuk beberapa waktu. Penyebab utama terjadinya kerusakan adalah mutu bahan dan pengerjaan berkualitas rendah. Kedua hal tersebut menghasilkan struktur dan dinding yang kurang kuat, sambungan kayu yang tidak memadai, tidak adanya perkuatan balok lingkar dan kolom praktis. Penyebab lainnya adalah pelaksanaan detail-detail sambungan, penulangan dan lain-lain yang tidak betul.

Untuk melaksanakan rehabilitasi bangunan sekolah yang rusak sebagai akibat bencana alam atau rehabilitasi untuk menghasilkan sekolah tahan gempa, Kegiatan Pembangunan Pendidikan Daerah Bencana Alam dan Kerusakan meluncurkan subsidi sarana prasarana pendidikan. Hal ini dilakukan untuk menunjang kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Kegiatan utama yang telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan program ini adalah: (1) rehabilitasi gedung yang rusak, baik karena bencana maupun kerusakan, (2) rehabilitasi sarana pendidikan lain yang mengalami kerusakan akibat bencana alam dan kerusakan sosial, (3) pemberian subsidi baik bagi daerah yang terkena bencana alam maupun yang terletak di daerah yang terisolasi karena faktor geografis.

Akibat berbagai bencana yang terjadi banyak ruang belajar, dan sarana belajar lain seperti laboratorium, sarana olahraga yang rusak. Berdasarkan data Balitbang Depdiknas (2003), dari sekitar 865.258 ruang belajar (lokal) terdapat sekitar 500.818 lokal SD/MI (57,9%) yang rusak ringan dan rusak berat. Sementara pada jenjang SMP dari sekitar 187.480 ruang belajar terdapat 31.198 lokal SMP/MTs (17,7%) yang juga mengalami rusak ringan dan berat.

Pada jenjang SMP terdapat sekitar 13.777 lokal (15,6%) yang rusak ringan dan rusak berat. Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap terjadinya bencana alam. Kerusakan gedung sekolah hampir

selalu terjadi pada setiap bencana alam di berbagai tempat di Indonesia. Kerusakan gedung sekolah mengakibatkan terganggunya kegiatan belajar mengajar untuk beberapa waktu.

Pada tahun 2007 program rehabilitasi sekolah pasca bencana yang menjadi prioritas adalah penuntasan rehabilitasi bangunan sekolah pasca bencana alam di Propinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah serta penanganan bencana alam di Propinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara (Mandailing Natal dan Langkat), Nangro Aceh Darussalam (Aceh Tamiang), Nusa Tenggara Timur (Manggarai), Sulawesi Utara (Kepulauan Sangihe), Jawa Barat (Bekasi), Banten (Tangerang), dan DKI Jakarta (Jakarta Utara).

Jumlah keseluruhan subsidi sarana prasarana tahun anggaran 2007 sebesar Rp146.025.000.000,00. Kegiatan tanggap darurat berupa pemberian bantuan tanggap darurat untuk menunjang terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Jumlah dana yang disediakan untuk kegiatan tanggap darurat bidang pendidikan sebesar Rp 450.000.000,00. Kegiatan penanggulangan bencana berupa pemberian pakaian sekolah, tas, buku dan tenda.

Tahun 2007 Rehabilitasi dan Rekonstruksi SD Pasca Bencana (*Debt Swap for Education IV*) 163 Sekolah Rp 96.948.785.000. Jawa Tengah 50 Sekolah Rp 29.564.000.000.

### **3. Pendanaan Massal**

Anggaran pendidikan untuk peningkatan mutu dipergunakan untuk sejumlah program utama, yakni:

#### **Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)**

Peningkatan mutu sekolah juga dilakukan dengan bantuan pembiayaan berupa BOMM. BOMM merupakan pembiayaan untuk program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) yang dilaksanakan sejak 1999. Prinsip-prinsip MPMBS yaitu fokus pada mutu,

pelaksanaan kurikulum 2004 –kemudian diperbarui kurikulum tingkat satuan pendidikan, pengelolaan secara jujur dan transparan, perencanaan dan pengambilan keputusan secara demokratis dengan melibatkan semua warga sekolah, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*sustainable improvement*).

Kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai dengan dana BOMM berupa program wajib dan program pilihan. Program wajib berkaitan dengan implementasi kurikulum dan program pembekalan kecakapan hidup (*life skill*), antara lain: peningkatan kompetensi guru dalam rangka pelaksanaan KTSP dan *life skill*. Kegiatan dilaksanakan melalui forum musyawarah guru dan matapelajaran (MGMP) atau institusi lain yang memiliki kompetensi. BOMM harus dialokasikan separuhnya untuk program wajib.

Sedangkan yang berupa program pilihan berupa *School Based Management*, berupa kegiatan:

1. Pengembangan model-model pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan bagi siswa dan guru.
2. Memfasilitasi musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesional guru.
3. Pengembangan kreativitas siswa dalam bidang-bidang penelitian ilmiah remaja, keilmuan (matematika, fisika, kimia, biologi, komputer, bahasa inggris), seni, sosial, olahraga, dan keagamaan.
4. Peningkatan dan pengembangan wawasan bagi warga sekolah dalam rangka pengembangan kultur sekolah yang menyenangkan, mengasyikkan, dan mencerdaskan melalui simposium atau lokakarya.
5. Pendayagunaan laboratorium: fisika, kimia, biologi, bahasa, dan komputer.
6. Peningkatan sistem administrasi sekolah dengan komputerisasi.
7. Peningkatan kemampuan tenaga administrasi, laboran, dan pustakawan.

Jenis peruntukan dana di atas dicantumkan dalam format rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), beserta uraian

program/kegiatan sekolah dengan merinci sasaran dan total biaya per jenis peruntukan.

Peruntukan dana tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara pihak sekolah dan Komite Sekolah. Pelaksanaan pekerjaan/program bantuan dan pengelolaan dana bantuan dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah bersama-sama dengan komite sekolah yang dilakukan secara transparan serta akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah.

Pengelolaan dana bantuan imbal swadaya dikelola oleh bendahara rutin sekolah (atau bendahara yang ditunjuk khusus oleh kepala sekolah untuk mengelola dana *block grant*) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pembukuan dana bantuan harus tersendiri dan tidak disatukan dengan pembukuan keuangan sekolah secara umum (rutin).
2. Pembukuan dana bantuan itu berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi dan disertai bukti-bukti pengeluaran yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendaharawan sekolah.
3. Pembukuan ditutup pada setiap akhir bulan dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendaharawan sekolah.
4. Pengelolaan dana BOMM berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.

### **Bos Buku**

Tujuan utama BOS Buku adalah memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka pengadaan buku teks pelajaran bagi seluruh siswa, membantu masyarakat meringankan beban biaya pendidikan, dan meningkatkan mutu pendidikan dasar di Indonesia. Pemerintah memberikan BOS Buku mulai tahun 2006. BOS buku diberikan kepada siswa SD/MI dan SMP/MTs yang menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Dana BOS Buku tahun 2006 mencapai Rp 594.794.200.000 yang diperuntukkan bagi 19.934.961 siswa SD dan 7.101.139 untuk siswa SMP di 12 provinsi. Setiap siswa menerima dua buah buku. Pada tahun 2006, pembagian buku sempat terlambat karena molornya kesepakatan harga dengan penerbit. Distribusi buku yang mestinya sebelum tahun pelajaran baru, 2006/2007, baru terlaksana pada November 2006.

Tahun 2007, *unit cost* BOS Buku meningkat sesuai kesepakatan dengan penerbit buku, yang diwakili Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi). *Unit cost* BOS Buku meningkat dari Rp 20.000/buku per tahun menjadi Rp 22.000/buku per tahun. Penerima dana BOS Buku tahun ini juga diperluas hingga 21 provinsi. Mulai tahun 2007, BOS Buku juga diberikan kepada siswa SMP Terbuka.

BOS Buku merupakan bagian dari kebijakan perbukuan nasional yang memasuki fase baru sejak terbitnya Peraturan Mendiknas Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran. Substansi Permendiknas ini mengatur ketentuan sebagai berikut:

1. Buku dipilih sendiri oleh siswa atau sekolah

Pembelian buku teks pelajaran sepenuhnya diserahkan kepada siswa untuk memilih buku-buku berkualitas di toko buku. Guru hanya dibolehkan menganjurkan kepada siswa yang mampu membeli buku. Satuan pendidikan wajib menyediakan paling sedikit 10 eksemplar buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada setiap kelas untuk dijadikan koleksi perpustakaan sekolah, dan memenuhi kebutuhan buku khususnya membantu peserta didik yang tidak mampu.

2. Masa pakai buku teks pelajaran minimal lima tahun

Departemen Pendidikan Nasional menetapkan masa pakai buku teks pelajaran paling sedikit 5 tahun. Buku teks pelajaran tidak dipakai oleh satuan pendidikan apabila ada perubahan standar nasional pendidikan dan buku teks pelajaran dinyatakan tidak layak oleh Menteri Pendidikan Nasional. Tujuan kebijakan ini agar setiap satuan pendidikan tidak mengganti buku setiap tahun, sehingga buku yang sudah dipakai dapat dipergunakan oleh peserta didik di tahun berikutnya minimal selama 5

tahun. Kebijakan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat dalam penyediaan buku teks pelajaran.

3. Sekolah atau guru dilarang terlibat dalam penjualan buku pelajaran.

Guru, tenaga kependidikan, satuan pendidikan atau komite sekolah dilarang menjual buku teks pelajaran kepada peserta didik. Tujuan kebijakan ini agar citra tenaga kependidikan dan satuan pendidikan terjaga, tidak menjadi perantara penerbit buku dan satuan pendidikan.

4. Menghilangkan monopoli penulisan, pengadaan, dan distribusi buku, serta mendorong pasar buku berkembang

Buku-buku yang diperdagangkan di satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah. Buku yang dipilih adalah buku teks pelajaran yang telah ditetapkan Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan rekomendasi penilaian kelayakan dari Badan Standar Nasional Pendidikan. Buku yang akan digunakan oleh satuan pendidikan tidak berasal dari satu penerbit. Kebijakan ini merupakan upaya untuk menghilangkan monopoli pengadaan buku di satuan pendidikan dan mendorong industri penerbitan dan pasar buku di daerah.

5. Pemerintah membeli hak cipta buku-buku teks pelajaran

Kebijakan ini bertujuan untuk memperoleh buku teks pelajaran dengan harga murah namun berkualitas dengan cara membeli hak cipta dari penulis. Buku yang dibeli hak ciptanya adalah buku-buku yang telah memenuhi standar kelayakan yang telah ditetapkan Menteri Pendidikan Nasional atas rekomendasi kelayakan dari Badan Standar Nasional Pendidikan. Buku yang dialihkan hak ciptanya diharapkan dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Masyarakat boleh memperbanyak atau menjualnya dengan ketentuan biaya cetak ditambah margin keuntungan yang wajar. Harga buku diharapkan turun menjadi Rp 6.000-Rp 8.000/eksemplar. Tahun 2007, Departemen Pendidikan Nasional melalui Pusat Perbukuan telah membeli hak cipta dari penulis sebanyak 37 jilid naskah terdiri dari 4 jilid buku SD/MI, 9 jilid buku SMP/MTs, 4 jilid buku SMA/MA, dan 4 jilid buku SMK.

Sebelum berlakunya Pemendiknas Nomor 11 Tahun 2005 itu, sejumlah kebijakan mengenai pengadaan buku pelajaran pernah berlaku di Indonesia. Sampai tahun 1995/1996, kebijakan yang berlaku adalah sistem buku paket. Pada fase buku paket, pengadaan buku sepenuhnya di bawah kewenangan Depdiknas melalui penerbit Balai Pustaka. Balai Pustaka merupakan unit bisnis di bawah Depdiknas. Depdiknas memegang monopoli tunggal pengadaan buku. Buku paket itu didistribusikan secara gratis ke sekolah-sekolah. Pada fase ini siswa dan sekolah sangat diuntungkan karena tidak mengeluarkan uang. Monopoli buku ini menguntungkan Balai Pustaka dan subkontraktor pengadaan buku.

Pada kurun tahun 1995-2001, dikenal sistem pengadaan buku pelajaran yang mengacu pada aturan dari Bank Dunia, khususnya untuk pengadaan mutu mata pelajaran SMP. Lembaga donor yang berpusat di Washington DC tersebut mendanai proyek buku pelajaran SMP, bertajuk "Book and Reading Development Project" (Proyek Pengembangan Buku dan Minat Baca). Proyek ini berupa pengadaan jutaan eksemplar buku pelajaran untuk 12 matapelajaran SMP. Setiap siswa memperoleh satu buah buku.

Tujuan utamanya proyek pengembangan buku dan minat baca untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dalam rangka menyukseskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Pengadaan buku melalui sistem tender. Semua persyaratan pengadaan buku harus sesuai ketentuan dipandu oleh Bank Dunia. Buku yang boleh dipakai adalah yang telah lulus penilaian oleh Panitia Nasional Penilai Buku Pelajaran.

Proyek buku Bank Dunia mengatur pengadaan buku pelajaran di bawah koordinasi Direktorat Sarana Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Nilai proyek yang sepenuhnya dibiayai Bank Dunia ini mencapai US\$ 132,5 juta, diluncurkan pada 1 Oktober 1995 dan berakhir 1 Oktober 2000. Perubahan sangat penting pada periode ini, selain menyangkut proses pengadaannya, juga melibatkan penerbit-penerbit swasta. Tidak ada lagi monopoli Balai Pustaka.

Proses pengadaannya dibagi menjadi dua tahap: penilaian dan pengadaan. Penilaian buku dilakukan oleh National Textbook Evaluation Committee (NTEC) atau Panitia Nasional Penilai Buku Pelajaran, Depdiknas pusat. Anggotanya adalah para pakar dari perguruan tinggi. Peran Depdiknas hanya sebatas menyeleksi dan menilai buku. Sementara pengadaan dan distribusinya dikerjakan oleh Project Manajemen Unit (PMU) di tingkat provinsi. Para penerbit yang bukunya dinyatakan lulus seleksi oleh NTEC harus berkompetisi di tingkat provinsi.

Mekanisme tender yang diberlakukan pada proyek buku Bank Dunia itu tampak bagus. Namun dalam pelaksanaannya ada kekurangan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Masih ada celah-celah yang memungkinkan terjadinya kongkalikong antara pihak penerbit dengan panitia pengadaan buku, sehingga menjadi tidak efisien.

Sebagai koreksi terhadap sistem pengadaan buku yang diprakarsai Bank Dunia, lahirlah era pengadaan buku yang sepenuhnya diserahkan ke sekolah, atau dikenal dengan pola *block grant* (2000-2004). Pengadaan buku diserahkan sepenuhnya ke sekolah. Sekolah dipersilahkan membeli buku dari penerbit manapun, asalah buku itu sudah dinyatakan lulus penilaian dari Panitia Penilai Buku Pelajaran (PNPBP), Departemen Pendidikan Nasional. Pemerintah mengucurkan dana langsung ke sekolah dalam bentuk hibah atau *block grant*. Depdiknas hanya berperan dalam proses penilaian dan penentuan kelulusan buku, yang dilakukan PNPBP.

Persoalan muncul ketika peran toko buku dalam mata rantai produksi-distribusi-konsumsi buku pelajaran diperkecil porsinya. Penerbit sebagai produsen berhubungan langsung dengan sekolah sebagai konsumen. Memang, keuntungan dari pola ini adalah sekolah memiliki kebebasan dalam membeli sendiri buku-buku yang sudah dinyatakan lulus seleksi oleh PNPBP di toko buku. Namun pada praktiknya, para penerbit yang bukunya lulus seleksi itu justru bergerilya ke sekolah-sekolah. Mereka berlomba memberi potongan harga tertentu kepada sekolah bila langsung membeli bukunya. Akibatnya, ada kecenderungan sekolah mengganti buku

pelajaran setiap tahun pelajaran baru, dan sekolah berperan sebagai agen penjualan buku.

Sekolah tak ubahnya menjadi penyalur buku-buku tertentu dari penerbit. Uang pembelian buku dipungut dari orangtua siswa pada awal tahun pelajaran baru. Biasanya, pungutan buku masuk pos kegiatan belajar-mengajar (KBM). Setiap tahun pelajaran baru, uang KBM mau tidak mau harus dibayar calon siswa.

Penerbit punya beragam strategi pendekatan ke sekolah-sekolah. Selain menawarkan kelebihan buku-buku terbitan mereka, rabat yang besarnya bisa mencapai 40 persen dari harga buku menjadi iming-iming buat sekolah. Tak sedikit penerbit yang mengiming-imingi sekolah berupa hadiah langsung, seperti perangkat elektronik yang dibutuhkan sekolah. Kelemahan-kelemahan pada model pengadaan buku sebelumnya kemudian diperbaiki melalui Permendiknas Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran.

Peraturan Mendiknas mengenai buku pelajaran ini di satu sisi berseberangan dengan kepentingan penerbit. Namun, yang lebih penting semangatnya mempersempit gerak praktik monopoli. Beberapa pasal aturan itu di antaranya: Pasal 7 ayat 1, menegaskan masa pakai buku teks pelajaran oleh satuan pendidikan minimal 5 tahun. Pasal 8 tegas menyatakan guru hanya dapat menganjurkan pembelian buku pelajaran kepada siswa yang mampu.

Bahkan dalam butir lain juga ditegaskan guru tidak bisa memaksa atau mewajibkan murid membeli buku teks pelajaran. Kebutuhan buku pelajaran bagi siswa tak mampu menjadi tanggung jawab sekolah. Sekolah diwajibkan menyediakan minimal 10 eksemplar buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada setiap kelas, yang menjadi koleksi perpustakaan.

Pasal 9 menegaskan bahwa guru, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah tidak dibenarkan melakukan penjualan buku kepada peserta didik.

#### 4. Ujian Nasional

Salah satu instrumen untuk menilai mutu siswa secara nasional adalah ujian nasional. Sukses penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun mencakup tiga indikator, yaitu APK SMP/MTs/Pendidikan Setara 95%, angka disparitas antara APK perkotaan dan pedesaan (kabupaten) sekitar 16%, dan nilai rata-rata Ujian Nasional mencapai 7,0.

Hingga 31 Agustus 2007, APK SMP/MTs/Pendidikan Setara mencapai 93,79%. Disparitas APK di perkotaan dan pedesaan masih 23%. Sedangkan nilai rata-rata secara nasional Ujian Nasional SMP/MTs mencapai 7,05.

*Tabel Pertumbuhan Mutu SMP Negeri/Swasta Berdasarkan Nilai Ujian Nasional Tahun Ajaran 2002/2003 s.d 2006/2007*

Berdasar Jumlah sekolah

Level	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007
A (Baik Sekali)	135	182	2.042	5.098	5.240
B (Baik)	864	1.473	6.401	9.478	9.778
C (Sedang)	4.544	7.595	8.754	6.332	6.197
D (Kurang)	11.012	10.653	4.028	1.362	1.733
E (Kurang Sekali)	2.695	792	475	183	254

Berdasarkan Persentase

Level	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007
A (Baik Sekali)	0,7 %	0,9%	9,4%	22,8%	22,6%
B (Baik)	4,5%	7,1%	29,6%	42,4%	42,1%
C (Sedang)	23,6%	36,7%	40,4%	28,4%	26,7%
D (Kurang)	57,2%	51,5%	18,6%	6,1%	7,5%
E (Kurang Sekali)	14,0%	3,8%	3,1%	0,8%	1,1%

*Sumber: Depdiknas 2007*

Adanya klasifikasi itu mendorong setiap sekolah berusaha keras dalam persiapan ujian nasional. Selain agar siswa itu berkualitas dan mendapatkan sekolah yang baik, hal ini berpengaruh juga terhadap peningkatan standar sekolah mereka.

## **5. Akreditasi Sekolah**

Satu paket dengan penetapan PP Standar Nasional Pendidikan adalah dibentuknya Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan. Anggota BSNP terdiri dari ahli-ahli bidang psikometri, evaluasi pendidikan, kurikulum, dan manajemen pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan.

BSNP berwenang mengembangkan standar nasional pendidikan, menyelenggarakan ujian nasional, memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan, serta merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Selain perlunya evaluasi untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan, standar nasional pendidikan juga menghendaki adanya akreditasi, dan sertifikasi. Akreditasi dulu dialamatkan ke sekolah-sekolah swasta dan perguruan tinggi, yang jauh lebih dulu dilaksanakan. Kini sekolah/madrasah negeri pun menjalani proses akreditasi yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional (BAN). Akreditasi bukan hanya untuk sekolah/madrasah, melainkan juga diperuntukkan pada pendidikan nonformal. BAN bertugas sebagai badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

*Tabel Perluasan dan Peningkatan Mutu Akreditasi oleh BAN SM*

Program	Kegiatan	2005	2006	2007	
				Keluaran	Keterangan
Perluasan dan Peningkatan Mutu Akreditasi oleh BAN SM	SD	14.852 SD	29.173 SD	28.868 SD	Terakreditasi 36.126 SD
	SMP	7.000 SMP	4.251 SMP	7.150 SMP	Terakreditasi 7.533 SMP
	SMA	780 SMA	1.880 SMA	2.060 SMA	Terakreditasi 3.228 SMA
	SMK	452 SMK	1.916 SMK	3.040 SMK	Terakreditasi 2.385 SMK
	SLB	129 SLB	292 SLB	226 SLB	Terakreditasi 209 SLB

### **C. RINTISAN SEKOLAH STANDAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL**

#### **1. Sekolah Standar Nasional**

Mengacu pada pemenuhan standar nasional pendidikan Depdiknas mengelompokkan sekolah sebagai berikut:

1. Sekolah Potensial: yaitu sekolah yang relatif masih banyak kekurangan/kelemahan untuk memenuhi kriteria sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
2. Sekolah Standar Nasional (SSN): adalah sekolah yang sudah hampir memenuhi delapan SNP yaitu: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar manajemen, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
3. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal: sekolah kategori ini selain memenuhi kriteria SSN juga sekolah yang memiliki keunggulan dalam

mata pelajaran agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, kepribadian, IPTEK, estetika, olahraga dan kesehatan.

4. Sekolah Bertaraf Internasional: SBI adalah sekolah nasional yang menyiapkan peserta didik berdasarkan standar nasional pendidikan dan standar internasional. Sehingga lulusan sekolah ini memiliki kemampuan daya saing internasional.

Sekolah Standar Nasional dirintis tahun 2004. Model ini telah disosialisasikan Direktorat Pembinaan SMP pada 2007. Sekolah kategori SSN berjumlah 1.909 SMP yang tersebar di 33 provinsi. Tujuan didirikannya SSN adalah menjadikan model SMP sesuai SNP sehingga dapat menjadi rujukan bagi sekolah lain yang belum berstandar nasional, juga sebagai rintisan menuju sekolah bertaraf internasional. Saat ini SSN sudah di atas 10%.

*Tabel Sekolah Standar Nasional 2004-2007*

N0	Provinsi	2004	2005	2006	2007	Total
1	DKI Jakarta	17	21	5	27	70
2	Jawa Barat	51	18	14	84	167
3	Jawa Tengah	71	113	4	112	300
4	DI Yogyakarta	13	20	-	20	53
5	Jawa Timur	79	141	64	124	408
6	NAD	19	1	-	30	50
7	Sumatera Utara	28	2	2	44	76
8	Sumatera Barat	16	3	1	25	45
9	Riau	12	1	-	19	32
10	Jambi	13	-	-	20	33
11	Sumatera Selatan	12	-	3	19	34
12	Lampung	11	2	2	17	32
13	Kalimantan Barat	11	-	-	17	28
14	Kalimantan Tengah	15	-		24	39

15	Kalimantan Selatan	15			24	39
16	Kalimantan Timur	13			20	33
17	Sulawesi Utara	9		2	14	25
18	Sulawesi Tengah	9			14	23
19	Sulawesi Selatan	33	13	18	52	116
20	Sulawesi Tenggara	9		1	14	24
21	Maluku	6		1	9	16
22	Bali	16	7	7	25	55
23	Nusa Tenggara Barat	7			11	18
24	Nusa Tenggara Timur	13			20	33
25	Papua	10			16	26
26	Bengkulu	8			13	21
27	Banten	12	1		19	32
28	Bangka Belitung	9			14	23
29	Maluku Utara	6			9	15
30	Gorontalo	7			11	18
31	Kepulauan Riau	2			3	5
32	Irian Jaya Barat	4			6	10
33	Sulawesi Barat	4			6	10
	JUMLAH	560	343	124	882	1909

*Sumber: Direktorat SMP, 2007*

Proses sosialisasi SMP SSN melalui tiga tahap. Yakni rintisan, konsolidasi, dan kemandirian. Setelah sosialisasi, fase berikutnya adalah seleksi yang dilaksanakan setiap tahun. Seleksi selain melihat hasil ujian nasional, sekolah harus memenuhi delapan standar kompetensi sesuai SNP.

Strategi dan fokus pengembangan SSN diarahkan pada lima aspek, yaitu melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS), mengembangkan inovasi pembelajaran, menciptakan komunitas pembelajaran, mengembangkan profesionalisme guru dan menggalang dukungan masyarakat.

Proses belajar mengajar di SMP SSN juga disyaratkan menggunakan metode *contextual teaching and learning (CTL)*. Pembelajaran yang mengacu pada CTL harus diterapkan di SSN. Tujuannya agar siswa belajar lebih menyenangkan atau *enjoy learning*.

CTL merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih memperhatikan karakteristik siswa atau daerah tempat pembelajaran. Aplikasi pendekatan CTL bermula dari penelitian John Dewey pada 1916 yang menyimpulkan bahwa siswa akan belajar dengan baik bila apa yang dipelajari terkait dengan apa yang telah diketahui atau terjadi di sekelilingnya.

## **2. Sekolah Bertaraf Internasional**

Era globalisasi adalah salah satu alasan pemerintah mulai mengharuskan tiap kabupaten merintis Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) mulai tingkat SMP. Payung hukum SBI adalah Pasal 50 ayat 3 UU Sisdiknas yang menyebutkan bahwa "Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional."

Selanjutnya, dalam Pasal 61 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juga dinyatakan: "Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional".

Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 juga menyatakan bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa, perlu dikembangkan sekolah bertaraf internasional pada tingkat kabupaten/kota melalui kerjasama yang konsisten antara pemerintah

dengan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan, untuk mengembangkan SD, SMP, SMA, dan SMK yang bertaraf internasional.

SBI adalah sekolah yang menyiapkan peserta didik berdasarkan standar nasional pendidikan (SNP) Indonesia dan tarafnya internasional sehingga lulusan memiliki kemampuan daya saing internasional.

Secara konsep  $SBI = SNP + X$ . SNP meliputi 8 standar meliputi kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dana, pengelolaan dan penilaian. Sedangkan X adalah nilai plus yang saat ini sedang dibahas di pusat kurikulum.

Menurut buku *Sistem Penyelenggaraan SBI* (2007), Ditjen Mandikdasmen, X merupakan penguatan, pengayaan, pengembangan, perluasan, pendalaman melalui adaptasi atau adopsi terhadap standar pendidikan, baik dari dalam maupun luar negeri yang telah memiliki reputasi mutu yang diakui secara internasional.

Visi SBI adalah terwujudnya insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif secara internasional. Visi tersebut memiliki implikasi bahwa persiapan manusia bertaraf internasional memerlukan upaya-upaya yang dilakukan secara intensif dan terarah.

Upaya untuk mengembangkan pendidikan, setiap SMP SBI harus menggunakan bahasa komunikasi global, terutama bahasa Inggris dan menggunakan teknologi komunikasi informasi (*Information Communication Technology/ICT*). Bahasa pengantar belajar mengajar menggunakan pola dwibahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris..

Pada rintisan SBI dibagi dalam empat model: sekolah baru (*Newly Developed SBI*), model pengembangan sekolah yang ada (*Existing Developed SBI*), model terpadu dan model kemitraan. Dari keempat model penyelenggaraan itu SBI dikembangkan dengan 8 prinsip utama. Yaitu:

1. Pengembangan SBI mengacu pada SNP+X.
2. SBI dikembangkan berdasarkan atas kebutuhan dan prakarsa sekolah (*demand driven and bottom up*).

3. Kurikulum bertaraf internasional yang ditunjukkan oleh pengembangan isi yang mutakhir dan canggih dengan perkembangan ilmu pengetahuan global.
4. SBI menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) dengan tata kelola yang baik.
5. SBI menerapkan proses belajar mengajar yang pro-perubahan dan inovatif
6. SBI menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang memiliki visi ke depan (visioner)
7. SBI harus memiliki SDM yang profesional, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
8. Penyelenggaraan SBI harus didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap, relevan, mutakhir dan canggih seperti laptop di laboratorium, LCD, TV, dan media pendidikan penunjang lainnya.

Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional perlu dilakukan secara intens, terarah, terencana, bertahap dengan berdasarkan pada skala prioritas yang mempertimbangkan keberagaman dan status Sekolah/Madrasah pada saat ini, baik yang baru akan menyelenggarakan maupun yang telah menyelenggarakan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional.

Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional melalui dua tahapan atau fase, yaitu:

1. Fase Rintisan

Dalam fase rintisan ini terdiri atas dua tahap, yaitu: (1) tahap pengembangan kemampuan/kapasitas sumber daya manusia, modernisasi manajemen dan kelembagaan, dan (2) tahap konsolidasi. Pengembangan kemampuan/kapasitas sumber daya manusia dilakukan terhadap guru, kepala Sekolah/Madrasah, dan tenaga kependidikan lainnya, serta pengembangan dan modernisasi manajemen dan kelembagaan Sekolah/Madrasah. Pengembangan kemampuan/kapasitas dilakukan dengan

penilaian terhadap kondisi nyata sumber daya manusia saat ini yang ada di Sekolah/Madrasah dan ditindaklanjuti dengan pelatihan. Apabila diperlukan dapat melakukan studi banding ke penyelenggara Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional yang *well-established*.

Pengembangan dan modernisasi manajemen Sekolah/Madrasah dilakukan untuk mengubah manajemen Sekolah/Madrasah yang tradisional menjadi manajemen Sekolah/Madrasah yang modern dengan melibatkan dan/atau memerankan komite Sekolah/Madrasah. Pengembangan dan modernisasi kelembagaan dilakukan dengan melengkapi infrastruktur Sekolah/Madrasah yang mengacu pada penggunaan teknologi komunikasi dan informasi (ICT). Konsolidasi dilakukan untuk menemukan praktek-praktek yang baik (*the best practices*) dan pelajaran-pelajaran yang dipetik (*the lessons learned*), baik melalui diskusi fokus terbatas maupun diskusi fokus secara luas melalui lokakarya atau seminar. Melalui fase rintisan ini, pengembangan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional diharapkan bisa memberikan hasil yang optimal, sistematis.

## 2. Fase Kemandirian

Dalam fase kemandirian ini, pengembangan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional diharapkan telah mampu bersaing secara internasional yang ditunjukkan oleh kepemilikan daya saing yang tangguh dalam lulusan, kurikulum, proses belajar mengajar, penilaian, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan pengelolaan serta kepemimpinan. Dengan kata lain, Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional telah memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan bersaing di forum internasional.

Indikasi bahwa Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional telah mencapai fase kemandirian antara lain yaitu: (a) Tumbuh prakarsa sendiri untuk memajukan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional; (b) Kemampuan berfikir dan kesanggupan bertindak secara rasional dan kreatif (inisiatif) dalam penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional; dan (c) Kemantapan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional untuk bersaing di forum internasional.

Pada prinsipnya Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional harus bisa memberikan jaminan mutu pendidikan dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Nasional Pendidikan. Esensi dari rumusan konsepsi Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Sekolah/Madrasah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan yaitu Sekolah/Madrasah yang sudah melaksanakan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
2. Diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan dapat dilaksanakan melalui dua cara sebagai berikut:
  - a. Adaptasi yaitu penyesuaian unsur-unsur tertentu yang sudah ada dalam Standar Nasional Pendidikan dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan;
  - b. Adopsi yaitu perubahan unsur-unsur tertentu yang belum ada dalam Standar Nasional Pendidikan dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara OECD dan/atau negara

maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan;

- c. OECD yang berlokasi di Paris, Prancis merupakan organisasi internasional untuk membantu pemerintah negara-negara anggotanya menghadapi tantangan globalisasi ekonomi. Secara historis, Konvensi OECD pada awalnya ditandatangani hanya oleh beberapa negara pada tanggal 14 Desember 1960. Sejak saat itu sampai sekarang ini sebanyak 30 negara telah menjadi anggota dan telah menyerahkan instrumen ratifikasi ke OECD, yaitu: Australia (7 June 1971), Austria (29 September 1961), Belgia (13 September 1961), Kanada (10 April 1961), Republik Ceko (21 Desember 1995), Denmark (30 Mei 1961), Finlandia (28 Januari 1969), Perancis (7 Agustus 1961), Jerman (27 September 1961), Yunani (27 September 1961), Hungaria (7 Mei 1996), Islandia (5 Juni 1961), Irlandia (17 Agustus 1961), Italia (29 Maret 1962), Jepang (28 April 1964), Korea (12 Desember 1996), Luksemburg (7 Desember 1961), Meksiko (18 Mei 1994), Belanda (13 November 1961), Selandia Baru (29 Mei 1973), Norwegia (4 Juli 1961), Polandia (22 November 1996), Portugal (4 Agustus 1961), Republik Slovakia (14 Desember 2000), Spanyol (3 Agustus 1961), Swedia (28 September 1961), Swiss (28 September 1961), Turki (2 Agustus 1961), Inggris (2 Mei 1961), Amerika Serikat (12 April 1961). Negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan adalah negara-negara maju yang tidak termasuk dalam keanggotaan OECD, tetapi keunggulannya bisa diadaptasi dan/atau diadopsi.
- d. Daya saing forum internasional memiliki makna bahwa siswa dan lulusan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional antara lain dapat: (a) melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan yang bertaraf internasional, baik di dalam maupun di luar negeri; (b) mengikuti sertifikasi bertaraf internasional yang diselenggarakan

oleh salah satu negara OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan;

(c) meraih medali tingkat internasional pada berbagai kompetensi sains, matematika, teknologi, seni, dan olah raga;

dan (d) bekerja pada lembaga-lembaga internasional dan/atau negara-negara lain.

Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional memiliki karakteristik keunggulan yang ditunjukkan dengan pengakuan internasional terhadap proses dan hasil atau keluaran pendidikan yang berkualitas dan teruji dalam berbagai aspek. Pengakuan internasional ditandai dengan penggunaan standar pendidikan internasional dan dibuktikan dengan hasil sertifikasi berpredikat baik dari salah satu negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan

Mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan keberhasilan memperoleh akreditasi yang sangat baik. Akreditasi menentukan kelayakan program pendidikan dan/atau satuan pendidikan itu sendiri. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja minimal, yaitu perolehan sertifikat akreditasi minimal “ predikat A” dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Dengan memperoleh “predikat A” pada setiap periode akreditasi berarti bahwa Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional setiap saat selalu menunjukkan keunggulan kinerja yang sangat baik dan sekaligus merupakan pengakuan terhadap kemampuan Sekolah/Madrasah untuk menjamin mutu pendidikan secara optimal.

Keberhasilan SBI ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci, yaitu hasil akreditasi yang baik dari salah satu negara anggota *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan.

Mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional juga dijamin dengan keberhasilan melaksanakan kurikulum secara tuntas. Kurikulum merupakan acuan dalam penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal sebagai berikut:

- 1) menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
- 2) menerapkan sistem satuan kredit semester di SMA/SMK/MA/MAK;
- 3) memenuhi Standar Isi; dan
- 4) memenuhi Standar Kompetensi Lulusan.

Keberhasilan SBI juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci:

- 1) sistem administrasi akademik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dimana setiap saat siswa bisa mengakses transkripnya masing-masing;
- 2) muatan mata pelajaran setara atau lebih tinggi dari muatan pelajaran yang sama pada sekolah unggul dari salah satu negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan; dan
- 3) menerapkan standar kelulusan sekolah/madrasah yang lebih tinggi dari Standar Kompetensi Lulusan.

Mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan keberhasilan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Proses pembelajaran disesuaikan dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Proses.

Keberhasilan SBI juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci berikut:

- 1) proses pembelajaran pada semua mata pelajaran menjadi teladan bagi sekolah/madrasah lainnya dalam pengembangan akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian unggul, kepemimpinan, jiwa entrepreneurial, jiwa patriot, dan jiwa inovator;
- 2) diperkaya dengan model proses pembelajaran sekolah unggul dari salah satu negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan;
- 3) menerapkan pembelajaran berbasis TIK pada semua mata pelajaran;
- 4) pembelajaran mata pelajaran kelompok sains, matematika, dan inti kejuruan menggunakan bahasa Inggris, sementara pembelajaran lainnya, kecuali pelajaran bahasa asing, harus menggunakan bahasa Indonesia; dan
- 5) pembelajaran dengan bahasa Inggris untuk mata pelajaran kelompok sains dan matematika untuk SD/MI baru dapat dimulai pada kelas VI.

Pada 2008, terdapat 100 SMA berbasis keunggulan lokal di 30 provinsi dan 100 kabupaten/kota, sebelas di antaranya sekolah swasta. Pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal di setiap kabupaten/kota juga dilakukan melalui program penguatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang meliputi bidang kelautan, kesenian, kerajinan, perhotelan, dan pertanian. Berikut daftar rintisan sekolah bertaraf internasional dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.

*Tabel SD Bertaraf Internasional*

DAFTAR REKAPITULASI SEKOLAH DASAR BERTARAF INTERNASIONAL TAHUN 2007				
No	Propinsi	Kab./Kota	Nama SD	Alamat

1	Nanggroe Aceh Darussalam	Kota Banda Aceh	MDN 110 Percontohan	Jl. S.M. Saleh Lr. Hka Jalil No. 3 Kel. Lalagang Banda Raya
2	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	SDN 105855 PTPN2	Jl. Batangkuis Comp. PTP-N II Desa Buntubedimbar Tanjung Morawa
3		Kab. Serdang Badagai	SD Negeri No. 101943 Bengkel	Jalan Permai Pasar Bengkel Kec. Perbauangan
4	Sumatera Barat	Kota Padang	SD Percobaan Padang	Jl. Ujung Gurun No. 56 Padang Kel. Ujung Gurun Padang Barat
5	Riau	Kab. Kampar	SDN 008 Salo Bangkinang	Jalan Prof. M. Yamin, SH Desa Salo Timur Kec. Bangkinang
6		Kota Rokan Hulu	SDN 002 Rambah	Jl. Tuanku Tambusai Desa Rambah Tengah Utara Rambah
7	Kepulauan Riau	Kota Batam	SD Negeri 006 Sekupang Kota Batam	Jalan Gajah Mada, Tiban Koperasi Kec. Sekupang
8	Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	SD Negeri X Pakalpinang	Jl. Pikas 11 Desa Air Salemba Pangkal Balam
9	Jambi	Kota Jambi	SD Negeri No. 47/IV	Jl. R.E Marthadinata Kel. Telanaipura Telanaipura Kota Jambi Jambi
10	Bengkulu	Kota Bengkulu	SD Negeri I Kota Bengkulu	Jl. Prof. DR. Hazairin, SH Kel. Malabro Baru Teluk Segara Kota Bengkulu Bengkulu
11	Sumatera Selatan	Kota Palembang	SD Negeri 179 Palembang	Jalan Let Simanjuntak Km 3.5 Kel. Pahlawan Kemuning

12	Lampung	Kota Bandar Lampung	SDN 2 Rawa Laut	Jalan Cendana No.33 Kel. Rawa Laut Tanjungkarang Timur
13	Banten	Kab. Serang	SDN Serang 2	Jalan Ki Masjung No. 1 Serang Desa Kota Baru Serang
14	DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	SDNP Kompleks IKIP Jakarta	Jalan Pemuda Kel. Rawamangun Pulogadung
15		Kota Jakarta Pusat	SDNP Menteng 01	Jalan Besuki No. 4 Kel. Menteng Menteng
16	Jawa Barat	Kota Cimahi	SDN Melong Mandiri I	Jalan Melong IV No. 196 Kel. Melong Cimahi Selatan
17		Kota Bogor	SD Negeri Sukadamai 3	Jalan Perdana No. 8 Budi Agung Kel. Sukadamai, Kec. Tanah Sareal
18		Kota Tasikmalaya	SDN Galunggung V	Jalan Galunggung No. 14 Kel. Tawang Sari Kec. Tawang
19	Jawa Tengah	Kota Surakarta	SDN Cemara Dua No.13	Jl. Monginsidi No. 66 Kel. Gilingan Banjarsari
20		Kota Pekalongan	SDN Klego 01	Jalan Jlampra No. 23 Kel. Klego Kec. Pekalongan
21	DI. Yogyakarta	Kab. Bantul	SD Bantul Manunggal	Jalan Gatot Subroto, Mandingan Desa Ringinharjo Bantul
22	Jawa Timur	Kab. Tulungagung	SDN Kp Dalem I	Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 6 Desa Kampungdalem Tulungagung
23		Kab. Pamekasan	SD Lawangan Daya II	Jl. Stadion No.45 Pamekasan Kel. Lawangan Daya II Pademawu

24		Kab. Trenggalek	SD Negeri 3 Surodakan	Kel. Surodakan Kec. Surodakan
25	Kalimantan Barat	Kab. Singkawang	SDN I Singkawang Tengah	Jalan Pahlawan Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah
26		Kab. Sambas	SD Negeri No. 4 Nagur	Jalan Pendidikan No. 20 Nagur Desa Jagur Kec. Sambar
27	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	SDN 006 Sungai Kunjang	Jalan Latsitarda I Desa. Karang Asam Ulu Sungai Kunjang
28	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	SDN Percontohan Telaga Biru I	Jalan Yos Sudarso No. 27 RT 33 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat
29	Sulawesi Selatan	Kab. Maros	SDN No. 2 Maros	Jalan Jend. A. Yani No. 3 Maros Kel. Turikale Turikale
30	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	SD Negeri 01 Poasia	Jalan Bunggasi No.19 Kel. Anduonohu Kec. Poasia
31	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	SD Negeri 8 Tondano	Jalan Mongisidi Kel. Wawalintouan Kec. Tondano Barat
32	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	SDN I Unggulan Mamuju	Jalan Sultan Hasanuddin No. 112 Kel. Binanga Mamuju
33	Gorontalo	Kota Gorontalo	SDN No. 30 Kec. Kota Selatan	Jalan Jaksa Agung Suprpto

				Kel. Limba U II
				Kota Selatan
34	Bali	Kota Denpasar	SDP N Tulangampiang	Jalan Mertayasa
				Desa Pemecutan Kaja
				Kec. Denpasar Utara
35	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Tengah	SDN 4 Praya	Jalan Ki Hajar Dewantara No. 5 Praya
				Kel. Praya, Kec. Praya
36	Maluku	Kota Ambon	SD Negeri I Latihan SPG	Jalan Dr Tamaela
				Kel. Urimessing
				Nusaniwe
37	Malulu Utara	Kota Tidore Kepulauan	SDN 2 Indonesiana	Jalan Timore No. 2
				Desa Indonesiana
				Tidore
38	Papua	Kota Jayapura	SD Negeri Kotaraja	Jalan Perkutut
				Kel. Vim
				Jayapura Selatan

#### Daftar SMP Bertaraf Internasional

No.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KAB/KOTA	PROPINSI
1	SMPN 1 Denpasar	Jl. Surapati No.2	Kota Denpasar	Bali
2	SMPN 1 Serang	Jl. Kh Abdul Fatah Hasan Blok D/8	Kab. Serang	Banten
3	SMPN 1 Pamulang	Jl. Pamulang Permai Barat II	Kab. Tangerang	Banten
4	SMPN 1 Tangerang	Jl. Daan Mogot No.51	Kota Tangerang	Banten
5	SMPN 1 Bengkulu	Jl. Jenderal Sudirman	Kota Bengkulu	Bengkulu
6	SMPN 1 Bantul	Jl. Ra. Kartini No.44	Kab. Bantul	D.I. Yogyakarta
7	SMPN 1 Karangmojo	Gedangrejo, Karangmojo	Kab. Gunung Kidul	D.I. Yogyakarta
8	SMPN 1 Galur	Jl. Raya Brosot No. 20	Kab. Kulon Progo	D.I. Yogyakarta
9	SMPN 4 Pakem	Sukunan, Pakembinangun	Kab. Sleman	D.I. Yogyakarta
10	SMPN 5 Yogyakarta	Jl. Wardani No.1	Kota Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
11	SMPN 1 Jakarta	Jl. Cikini Raya No. 87	Kota Jakarta Pusat	D.K.I. Jakarta
12	SMPN 19 Jakarta	Jl. Bumi No. 21 Blok E	Kota Jakarta Selatan	D.K.I. Jakarta

13	SMPN 115 Jakarta	Jl. Tebet Utara III	Kota Jakarta Selatan	D.K.I. Jakarta
14	SMPN 49 Jakarta	Jl. Raya Bogor	Kota Jakarta Timur	D.K.I. Jakarta
15	SMPN 30 Jakarta	Jl. Anggrek No.4	Kota Jakarta Utara	D.K.I. Jakarta
16	SMPN 1 Gorontalo	Jl. Jaksa Agung Suprpto No.1	Kota Gorontalo	Gorontalo
17	SMPN 1 Jambi	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.22	Kota Jambi	Jambi
18	SMPN 2 Cileunyi	Jl. Komplek DPR	Kab. Bandung	Jawa Barat
19	SMPN 1 Margahayu	Jl. Kopo No. 397	Kab. Bandung	Jawa Barat
20	SMPN 2 Ciamis	Jl. Jendral Sudirman No. 241	Kab. Ciamis	Jawa Barat
21	SMPN 1 Garut	Jl. Jend. A. Yani No.43	Kab. Garut	Jawa Barat
22	SMPN 2 Sindang	Jl. Murahnara No.5 Sindang	Kab. Indramayu	Jawa Barat
23	SMPN 5 Bandung	Jl. Sumatera No.40	Kota Bandung	Jawa Barat
24	SMPN 1 Bekasi	Jl. K.H. Agus Salim No.138	Kota Bekasi	Jawa Barat
25	SMPN 1 Bogor	Jl. Ir.H. Juanda No.16	Kota Bogor	Jawa Barat
26	SMPN 1 Cimahi	Jl. SMP No. 12	Kota Cimahi	Jawa Barat
27	SMPN 2 Depok	Jl. Bangau Raya Depok Jaya	Kota Depok	Jawa Barat
28	SMPN 2 Purwokerto	Jl. Gereja No. 20	Kab. Banyumas	Jawa Tengah
29	SMPN 1 Boyolali	Jl. Merapi No.22	Kab. Boyolali	Jawa Tengah
30	SMPN 1 Cilacap	Jl. Jendral A.Yani No.15	Kab. Cilacap	Jawa Tengah
31	SMPN 2 Demak	Jl. Sultan Patah No. 84	Kab. Demak	Jawa Tengah
32	SMPN 1 Purwodadi	Jl. Mayjen Sutoyo Siswomiharjo No.6	Kab. Grobogan	Jawa Tengah
33	SMPN 1 Karanganyar	Jl. Ir. H. Juanda No.18	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah
34	SMPN 1 Kebumen	Jl. Mayjen Sutoyo No. 22	Kab. Kebumen	Jawa Tengah
35	SMPN 2 Klaten	Jl. Pemuda Selatan No.4	Kab. Klaten	Jawa Tengah
36	SMPN 1 Kudus	Jl. Sunan Muria No. 10A	Kab. Kudus	Jawa Tengah
37	SMPN 1 Purbalingga	Jl. Kapten P Tendean No. 8	Kab. Purbalingga	Jawa Tengah
38	SMPN 3 Purworejo	Jl. Mardihusodo No.3	Kab. Purworejo	Jawa Tengah
39	SMPN 2 Rembang	Jl. Jend. Sudirman No. 127	Kab. Rembang	Jawa Tengah
40	SMPN 1 Ungaran	Jl. Diponegoro No.197	Kab. Semarang	Jawa Tengah
41	SMPN 5 Sragen	Jl. Mawar No.4	Kab. Sragen	Jawa Tengah
42	SMPN 1 Sukoharjo	Jl. Pemuda No. 36	Kab. Sukoharjo	Jawa Tengah
43	SMPN 2 Temanggung	Jl. Jend. Sudirman No.21	Kab. Temanggung	Jawa Tengah
44	SMPN 1 Magelang	Jl. Pahlawan No.66	Kota Magelang	Jawa Tengah
45	SMPN 2 Semarang	Jl. Brigjen Katamso No.14	Kota Semarang	Jawa Tengah
46	SMPN 1 Surakarta	Jl. Mt. Haryono No.4	Kota Surakarta	Jawa Tengah
47	SMPN 1 Tegal	Jl. Tentara Pelajar No.26	Kota Tegal	Jawa Tengah
48	SMPN 1 Genteng	Jl. Bromo No.49 Genteng	Kab. Banyuwangi	Jawa Timur
49	SMPN 1 Bojonegoro	Jl. Mh. Thamrin No.98	Kab. Bojonegoro	Jawa Timur
50	SMPN 1 Bondowoso	Jl. Letnan Karsono No.3	Kab. Bondowoso	Jawa Timur
51	SMPN 1 Gresik	Jl. Jaksa Agung Suprpto No.79	Kab. Gresik	Jawa Timur
52	SMPN 3 Jember	Jl. Jawa No. 8	Kab. Jember	Jawa Timur
53	SMPN 2 Pare	Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa	Kab. Kediri	Jawa Timur

		No.2		
54	SMPN 4 Kepanjen	Jl. Kawi No.1	Kab. Malang	Jawa Timur
55	SMPN 1 Ngoro	Jl. Raya Jasem No.3	Kab. Mojokerto	Jawa Timur
56	SMPN 1 Nganjuk	Jl. Pramuka No. 2	Kab. Nganjuk	Jawa Timur
57	SMPN 1 Pamekasan	Jl. Ra. Abd. Azis No.49	Kab. Pamekasan	Jawa Timur
58	SMPN 1 Pandaan	Jl. Raya Kebonwaris No.17	Kab. Pasuruan	Jawa Timur
59	SMPN 1 Sidoarjo	Jl. A. Yani No.4	Kab. Sidoarjo	Jawa Timur
60	SMPN 1 Trenggalek	Jl. Dr. Sutomo No.10	Kab. Trenggalek	Jawa Timur
61	SMPN 1 Tuban	Jl. R.M.Suryo No.1	Kab. Tuban	Jawa Timur
62	SMPN 1 Tulungagung	Jl. Jend. Basuki Rahmat No.96	Kab. Tulungagung	Jawa Timur
63	SMPN 1 Blitar	Jl. Ahmad Yani No.8	Kota Blitar	Jawa Timur
64	SMPN 1 Kediri	Jl. Diponegoro No.26	Kota Kediri	Jawa Timur
65	SMPN 2 Madiun	Jl. H. Agus Salim No.31	Kota Madiun	Jawa Timur
66	SMPN 1 Malang	Jl. Lawu No.12	Kota Malang	Jawa Timur
67	SMPN 1 Mojokerto	Jl. Gajah Mada No. 143	Kota Mojokerto	Jawa Timur
68	SMPN 1 Probolinggo	Jl. Imam Bonjol No.49	Kota Probolinggo	Jawa Timur
69	SMPN 1 Surabaya	Jl. Pacar No. 4-6	Kota Surabaya	Jawa Timur
70	SMPN 6 Surabaya	Jl. Jawa No. 24	Kota Surabaya	Jawa Timur
71	SMPN 3 Pontianak	Jl. Kalimantan No.123	Kota Pontianak	Kalimantan Barat
72	SMPN 1 Banjarmasin	Jl. Batu Tiban No. 23 Komp.Mulawarman	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan
73	SMPN 6 Banjarmasin	Jl. Veteran Gg. Sempati No.6 Rt.30	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan
74	SMPN 2 Penajam	Jl. Raya Girimukti Km.16 Rt. 21	Kab. Penajam Paser Utara	Kalimantan Timur
75	SMPN 1 Balikpapan	Jl. Piere Tendean Gn. Pasir	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur
76	SMPN 1 Samarinda	Jl. Bhayangkara No.2	Kota Samarinda	Kalimantan Timur
77	SMPN 2 Pangkal Pinang	Jl. Veteran 181	Kota Pangkal Pinang	Kepulauan Bangka Belitung
78	SMPN 2 Bandar Lampung	Jl. Jenderal Sudirman No.108	Kota Bandar Lampung	Lampung
79	SMPN 1 Metro	Jl. Ar Prawiranegara No.4	Kota Metro	Lampung
80	SMPN 14 Ambon	Jl. Kebun Cengkeh	Kota Ambon	Maluku
81	SMPN 1 Bireun (asalnya SMPN 1 Jeumpa)	Jl. Laksamana Malahayati	Kab. Bireuen	NAD
82	SMPN 6 Banda Aceh	Jl. Tgk Abu Lam U No.1	Kota Banda Aceh	NAD
83	SMPN 3 Langsa	Jl. Jend. Ahmad Yani	Kota Langsa	NAD
84	SMPN 1 Lhokseumawe	Jl. Samudera	Kota Lhokseumawe	NAD
85	SMPN 2 Mataram	Jl. Pejangik No. 5	Kota Mataram	NTB
86	SMPN 1 Pekanbaru	Jl. Sultan Syarif Qasim No.157	Kota Pekanbaru	Riau
87	SMPN 12 Makassar	Jl. Komplek Perum. Unhas Tamalanrea	Kota Makassar	Sulawesi Selatan

88	SMPN 6 Makassar	Jl. Jendral A. Yani No.25	Kota Makassar	Sulawesi Selatan
89	SMPN 2 Parepare	Jl. Lahalede No. 84	Kota Pare-Pare	Sulawesi Selatan
90	SMPN 3 Luwuk	Jl. K.H. Dewantara No.10	Kab. Banggai	Sulawesi Tengah
91	SMPN 2 Palu	Jl. Wolter Monginsidi No.4	Kota Palu	Sulawesi Tengah
92	SMPN 2 Kolaka	Jl. Pramuka No.58	Kab. Kolaka	Sulawesi Tenggara
93	SMPN 1 Kendari	Jl. Dr.Ratulangi No. 111	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara
94	SMPN 1 Bitung	Jl. Wolter Monginsidi, Kel. Girian Weru	Kota Bitung	Sulawesi Utara
95	SMPN 1 Manado	Jl. W.R Supratman No. 72	Kota Manado	Sulawesi Utara
96	SMPN 8 Padang	Jl. Dr. Sutomo	Kota Padang	Sumatera Barat
97	SMPN 1 Pagar Alam	Jl. Serma Zainal Abidin	Kota Pagar Alam	Sumatera Selatan
98	SMPN 1 Palembang	Jl. Pangeran Ak. Abdurrohlim	Kota Palembang	Sumatera Selatan
99	SMPN 9 Palembang	Jl. Rudus Sekip Ujung	Kota Palembang	Sumatera Selatan
100	SMPN 1 Medan	Jl. Bunga Asoka No.6	Kota Medan	Sumatera Utara

#### Daftar SMA Bertaraf Internasional

No	Nama Sekolah	Alamat	Kab/Kota	Provinsi
1	SMAN 2 Plus Sipirok	Jl. YPMHB Desa Padang Bujur, Sipirok	Kab. Tapanuli Selatan	Sumatera Utara
2	SMAN 1 Matauli	Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1	Kab. Tapanuli Tengah	Sumatera Utara
3	SMAN 2 Balige	Jl. Kartini Soposurung Balige	Kab. Toba Samosir	Sumatera Utara
4	SMAN 1 Medan	Jl. Tengku Cik Ditiro No. 1	Kota Medan	Sumatera Utara
5	SMAS Sutomo 1	Jl. Letkol Martinus Lubis No. 7	Kota Medan	Sumatera Utara
6	SMAN 1 Lubuk Sikaping	Jl. Prof. Moh. Yamin No. 02	Kab. Pasaman	Sumatera Barat
7	SMAN 1 Bukittinggi	Jl. Syekh M. Jamil Jambek No. 36	Kota Bukit Tinggi	Sumatera Barat
8	SMAN 1 Padang	Jl. Jenderal Sudirman No.1	Kota Padang	Sumatera Barat
9	SMAN 10 Padang	Jl. Situjuh Padang Jati Utara	Kota Padang	Sumatera Barat
10	SMAN 1 Padang Panjang	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 9	Kota Padang Panjang	Sumatera Barat
11	SMAN 8 Pekanbaru	Jl. Abdul Muis No. 14	Kota Pekanbaru	Riau
12	SMAN Plus Riau	Jl. Lingkar Kubang raya	Kota Pekanbaru	Riau

13	SMAS Babusalam	Jl. HR. Soebrantas Km. 9.5	Kota Pekanbaru	Riau
14	SMAN 1 Batam	Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto	Kota Batam	Kepulauan Riau
15	SMAN 1 Jambi	Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 15	Kota Jambi	Jambi
16	SMAN 3 Jambi	Jl. Guru Mukhtar Jelutung	Kota Jambi	Jambi
17	SMAS Titian Teras Pijoan Jambi	Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulia Km. 21	Kab. Muaro Jambi	Jambi
18	SMAN 1 Muara Enim	Jl. Perwira No. 1	Kab. Muara Enim	Sumatera Selatan
19	SMAN 2 Sekayu	Jl. Kol Wahid Udin Lingk. I Kayuara	Kab. Musi Banyu Asin	Sumatera Selatan
20	SMAN 1 Kayuagung	Jl. Letnan Muchtar Saleh 07	Kab. Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan
21	SMAN 17 Palembang	Jl. Mayor Zurbi Bustan Lebong Siarang	Kota Palembang	Sumatera Selatan
22	SMAS Kusuma Bangsa	Jl. Residen H. Abdul Rozak	Kota Palembang	Sumatera Selatan
23	SMAS Xaverius 1	Jl. Bangau No. 60/1258	Kota Palembang	Sumatera Selatan
24	SMAN 1 Kota Gajah	Jl. Raya Kotagajah	Kab. Lampung Tengah	Lampung
25	SMAN 9 Bandar Lampung	Jl. Panglima Polim No. 18	Kota Bandar Lampung	Lampung
26	SMAN 1 Metro	Jl. AH. Nasution No. 222	Kota Metro	Lampung
27	SMAN 1 Serang	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 39	Kab. Serang	Banten
28	SMAN 1 Pamulang	Jl. Benda Timur XI Komp. Pamulang Permai 2	Kab. Tangerang	Banten
29	SMAN 2 Krakatau Steel Cilegon	Jl. Semang Raya No. 1	Kota Cilegon	Banten
30	SMAN 1 Tangerang	Jl. Daan Mogot No. 50	Kota Tangerang	Banten
31	SMAS Al-Azhar BSD	Jl. Puspita Loka Sektor 3.2 Bumi Serpong Damai	Kota Tangerang	Banten
32	SMAN 78 Jakarta	Jl. Bhakti IV/1 Komplek Pajak Kemanggisan	Jakarta Barat	DKI Jakarta
33	SMAN 68 Jakarta	Jl. Salemba Raya 18	Jakarta Pusat	DKI Jakarta
34	SMAN 8 Jakarta	Jl. Taman Bukit Duri	Jakarta Selatan	DKI Jakarta
35	SMAN 70 Jakarta	Jl. Bulungan Blok C1	Jakarta Selatan	DKI Jakarta
36	SMAS Al-Azhar 1	Jl. Sisingamangaraja	Jakarta Selatan	DKI Jakarta
37	SMAN 81 Jakarta	Jl. Kartika Eka Paksi Komp. Kodam Kalimalang	Jakarta Timur	DKI Jakarta
38	SMAS Lab School	Jl. Pemuda Komplek UNJ	Jakarta Timur	DKI Jakarta

	Jakarta			
39	SMAN 13 Jakarta	Jl. Seroja No.1 Tg. Priok	Jakarta Utara	DKI Jakarta
40	Islamic Boarding School	Jl. Raya Industri No. 1	Kab. Bekasi	Jawa Barat
41	SMAN 1 Tambun	Jl. Kebon Kelapa No. 01	Kab. Bekasi	Jawa Barat
42	SMAN 1 Subang	Jl. KH. Dewantara 14a	Kab. Subang	Jawa Barat
43	SMAN 3 Bandung	Jl. Belitung No. 8 Bandung	Kota Bandung	Jawa Barat
44	SMAS Krida Nusantara	Jl. Desa Cipadung	Kota Bandung	Jawa Barat
45	SMAN 5 Bekasi	Jl. Gamprit, Komp. Jatiwaringin Asri	Kota Bekasi	Jawa Barat
46	SMAN 1 Bogor	Jl. Ir. H. Juanda No. 16	Kota Bogor	Jawa Barat
47	SMAN 2 Cirebon	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.1	Kota Cirebon	Jawa Barat
48	SMAN 2 Depok	Jl. Gede Raya No. 177 ,Depok II Timur	Kota Depok	Jawa Barat
49	SMAS Cakrabuana	Jl. Raya Depok-Sawangan No. 91	Kota Depok	Jawa Barat
50	SMAS Lazuardi	Jl. Kampus (pakis) Sawangan Raya	Kota Depok	Jawa Barat
51	SMAN 2 Tasikmalaya	Jl. RE. Martadinata No. 261	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat
52	SMAS Taruna Nusantara	Jl. Raya Purworejo Km. 5	Kab. Magelang	Jawa Tengah
53	SMAN 1 Temanggung	Jl. Kartini No. 4	Kab. Temanggung	Jawa Tengah
54	SMAN 1 Magelang	Jl. Cepaka No. 1	Kota Magelang	Jawa Tengah
55	SMAN 1 Purwokerto	Jl. Gatot Subroto 73	Kab. Banyumas	Jawa Tengah
56	SMAN 1 Kebumen	Jl. Mayjen Sutoyo No. 7	Kab. Kebumen	Jawa Tengah
57	SMAN 1 Klaten	Jl. Merbabu 13	Kab. Klaten	Jawa Tengah
58	SMAN 1 Pati	Jl. P. Sudirman No. 24	Kab. Pati	Jawa Tengah
59	SMAN 1 Salatiga	Jl. Kemiri No. 1	Kota Salatiga	Jawa Tengah
60	SMAN 3 Semarang	Jl. Pemuda 149	Kota Semarang	Jawa Tengah
61	SMAN 1 Surakarta	Jl. Monginsidi No. 40	Kota Surakarta	Jawa Tengah
62	SMAN 1 Kasihan Bantul	Jl. Bugisan Selatan Tirtonirmolo	Kab. Bantul	DI Yogyakarta
63	SMAN 1 Yogyakarta	Jl. Hos Cokroaminoto 10	Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta
64	SMAN 3 Yogyakarta	Jl. Laksda Yos Sudarso 7	Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta
65	SMAS Muhammadiyah 2	Jl. Kapas No. 7 Semaki	Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta
66	SMAN 1 Bojonegoro	Jl. Panglima Sudirman No. 28	Kab. Bojonegoro	Jawa Timur
67	SMAN 1 Gresik	Jl. Arif Rahman Hakim No. 1	Kab. Gresik	Jawa Timur
68	SMAN 1 Jember	Jl. Letjen Panjaitan No. 55	Kab. Jember	Jawa Timur
69	SMAN 1 Mojoagung	Jl. Raya Janti No. 18	Kab. Jombang	Jawa Timur

70	SMAS Darul Ulum 2	Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan	Kab. Jombang	Jawa Timur
71	SMAN 1 Sidoarjo	Jl. Jenggala 1, Siwalan Panji	Kab. Sidoarjo	Jawa Timur
72	SMAN 1 Tuban	Jl. WR. Supratman No. 2	Kab. Tuban	Jawa Timur
73	SMAN 2 Kediri	Jl. Veteran No. 7	Kota Kediri	Jawa Timur
74	SMAN 3 Madiun	Jl. Suhud Nosingo No. 1	Kota Madiun	Jawa Timur
75	SMAN 3 Malang	Jl. Sultan Agung Utara No. 7	Kota Malang	Jawa Timur
76	SMAN 15 Surabaya	Jl. Menanggal 103	Kota Surabaya	Jawa Timur
77	SMAN 5 Surabaya	Jl. Kusuma Bangsa 21	Kota Surabaya	Jawa Timur
78	SMAS Khadijah Surabaya	Jl. Jend. A. Yani 2-4	Kota Surabaya	Jawa Timur
79	SMAN 1 Singaraja	Jl. Pramuka 4 Singaraja	Kab. Buleleng	Bali
80	SMAN 1 Gianyar	Jl. Ratna No. 1	Kab. Gianyar	Bali
81	SMAN 1 Denpasar	Jl. Kamboja 4 Denpasar	Kota Denpasar	Bali
82	SMAN 4 Denpasar	Jl. Gn Rinjani Perumnas	Kota Denpasar	Bali
83	SMAN 9 Manado	Jl. Jusuf Hasiru, Kompleks Kampus Kleak	Kota Manado	Sulawesi Utara
84	SMAS Eben Heizer	Jl. 14 Pebruari No. 95, Teling Atas	Kota Manado	Sulawesi Utara
85	SMAS Lokon	Jl. Perlombaan No. 99, Kakaskasen Dua	Kota Tomohon	Sulawesi Utara
86	SMAN 1 Telusiattingge	Jl. Poros Bone Wajo	Kab. Bone	Sulawesi Selatan
87	SMAN 2 Tinggimoncong	Jl. Poros Makassar - Malino Km. 62	Kab. Gowa	Sulawesi Selatan
88	SMAS Kristen Barana	Jl. Pamabi Barana, Buntu Barana, Rantepao	Kab. Tana Toraja	Sulawesi Selatan
89	SMAN 15 Makassar	Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami	Kota Makassar	Sulawesi Selatan
90	SMAN 17 Makassar	Jl. Sunu No. 11 Suangga	Kota Makassar	Sulawesi Selatan
91	SMAS Athirah	Jl. Kajaolaliddo No. 22	Kota Makassar	Sulawesi Selatan
92	SMAN 1 Martapura	Jl. Jenderal A. Yani 59 A	Kab. Banjar	Kalimantan Selatan
93	SMAN 1 Banjar Baru	Jl. Keruing No. 3	Kota Banjar Baru	Kalimantan Selatan
94	SMAN 1 Banjarmasin	Jl. Mulawarman No. 25	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan
95	SMAN 7 Banjarmasin	Jl. Dharma Praja V No. 47 Rt. 12	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan

96	SMAN 1 Balikpapan	Jl. Kapten Piere Tendean RT 30 No. 64	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur
97	SMAN 1 Bontang	Jl. KH Ahmad Dahlan No. 59	Kota Bontang	Kalimantan Timur
98	SMAN 1 Samarinda	Jl. Bhayangkara	Kota Samarinda	Kalimantan Timur
99	SMAN 10 Samarinda	Jl. HAM Rifadin RT 25 Harapan Baru	Kota Samarinda	Kalimantan Timur
100	SMAN 28 Jakarta	Jl. Raya Ragunan Pasar Minggu	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta
101	SMAN 61 Jakarta	Jl. Taruna Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta
102	SMAN 1 Cisarua	Jl. Kolonel Masturi No. 64	Kab. Bandung	Jawa Barat
103	SMAN 1 Baleendah	Jl. RAA. Wiranata Kusumah	Kota. Bandung	Jawa Barat
104	SMAN 5 Bandung	Jl. Belitung No. 8	Kota Bandung	Jawa Barat
105	SMAN 1 Bekasi	Jl.KH. Agus Salim No.181	Kota Bekasi	Jawa Barat
106	SMAN 3 Bogor	Jl. Pakuan 4	Kota Bogor	Jawa Barat
107	SMAN 2 Bogor	Jl. Keranji Ujung No. 1	Kota Bogor	Jawa Barat
108	SMAN 2 Ciamis	Jl. KH Akhmad Dahlan No.2 Linggasari	Kab. Ciamis	Jawa Barat
109	SMAN 1 Cianjur	Jl. P. Hidayatullah No. 62	Kab. Cianjur	Jawa Barat
110	SMAN 1 Depok	Jl. Nusantara Raya No. 317	Kota Depok	Jawa Barat
111	SMAN 1 Tarogong Kidul	Jl. Merdeka No. 91	Kab. Garut	Jawa Barat
112	SMAN 1 Garut	Jl. Siliwangi No. 2	Kab. Garut	Jawa Barat
113	SMAN 1 Sindang	Jl. Letjend MT. Haryono	Kab. Indramayu	Jawa Barat
114	SMAN 1 Karawang	Jl. Ahmad Yani No. 22	Kab. Karawang	Jawa Barat
115	SMAN 1 Majalengka	Jl. KH. Abdul Halim No. 113	Kab. Majalengka	Jawa Barat
116	SMAN 1 Cibadak	Jl. Perintis Kemerdekaan 72	Kab. Sukabumi	Jawa Barat
117	SMA Pesantren Terpadu Thayyibah	Jl. Karamatt No. 123	Kota Sukabumi	Jawa Barat
118	SMAN 3 Sukabumi	Jl. Raya Ciaul Baru No. 21	Kota Sukabumi	Jawa Barat
119	SMAN 1 Sumedang	Jl. Prabu Geusan Ulun No. 39	Kab. Sumedang	Jawa Barat
120	SMAN 1 Tasikmalaya	Jl. Rumah Sakit Umum No. 28	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat
121	SMAN 1 Palimanan	Jl. KH. Agus Salim 128	Kab. Cirebon	Jawa Barat
122	SMAN 1 Banjar	Jl. KH. Mustofa No. 1	Kota Banjar	Jawa Barat
123	SMAN 1 Banjarnegara	Jl. Letjen Suprpto 93A	Kab. Banjarnegara	Jawa Tengah
124	SMAN 1 Ajibarang	Jl. Raya Pancurendang, Ajibarang	Kab. Banyumas	Jawa Tengah
125	SMAN 2 Purwokerto	Jl. Jend. Gatot Subroto No.69	Kab. Banyumas	Jawa Tengah
126	SMAN 1 Cilacap	Jl. MT Haryono 730	Kab. Cilacap	Jawa Tengah
127	SMAN 1 Kudus	Jl. Pramuka No. 41	Kab. Kudus	Jawa Tengah
128	SMAN 1 Kajen	Jl. Mandurejo	Kab. Pekalongan	Jawa Tengah
129	SMAN 1 Pemalang	Jl. Jendral Gatot Subroto Pemalang	Kab. Pemalang	Jawa Tengah
130	SMAN 1 Purworejo	Jl. Tentara Pelajar No. 55	Kab. Purworejo	Jawa Tengah
131	SMAN 7 Purworejo	Jl. Ki Mangunsarkoro No 1	Kab. Purworejo	Jawa Tengah

132	SMAN 1 Rembang	Jl. Gajahmada No.5	Kab. Rembang	Jawa Tengah
133	SMAN 1 Ungaran	Jl. Diponegoro No. 42	Kab. Semarang	Jawa Tengah
134	SMA Islam Sudirman Ambarawa	Jl. Jenderal Sudirman No. 2A	Kab. Semarang	Jawa Tengah
135	SMAS Karangturi Semarang	Jl. Raden Patah 182-192	Kota Semarang	Jawa Tengah
136	SMAN 1 Semarang	Jl. Taman Menteri Supeno No. 01	Kota Semarang	Jawa Tengah
137	SMA Assalam Sukoharjo	Desa Pabelan	Kab. Sukoharjo	Jawa Tengah
138	SMA Regina Pacis	Jl. LU. Adi Sicipto No. 45	Kota Surakarta	Jawa Tengah
139	SMA MTA Surakarta	Jl. Kyai Mojo	Kota Surakarta	Jawa Tengah
140	SMAN 3 Surakarta	Jl. RE Martadinata 143	Kota Surakarta	Jawa Tengah
141	SMAN 1 Slawi	Jl. KH. Wahid Hasim No. 1	Kab. Tegal	Jawa Tengah
142	SMAN 1 Tegal	Jl. Menteri Supeno No. 16	Kota Tegal	Jawa Tengah
143	SMAN 1 Wonogiri	Jl.Perwakilan No.24	Kab. Wonogiri	Jawa Tengah
144	SMAN 2 Wonogiri	Jl. Nakula V Wonokarto	Kab. Wonogiri	Jawa Tengah
145	SMAN 1 Purbalingga	Jl. Letjen MT Haryono	Kab. Purbalingga	Jawa Tengah
146	SMAN 1 Wonosari	Jl. Brigjen Katamso No. 4	Kab. Gunung Kidul	D.I. Yogyakarta
147	SMA Kolese de Brito Sleman	Jl. Laksda Adisucipto 161, Catur Tunggal	Kab. Sleman	D.I. Yogyakarta
148	SMAN 2 Yogyakarta	Bener,Tegalrejo,Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
149	SMAN 8 Yogyakarta	Jl. Sidobali 1 Muja-Muju	Kota Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
150	SMA Stella Duce	Jl. Sabirin No. 1-3	Kota Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
151	SMA BOPKRI 1 Yogyakarta	Jl. Wardani No. 2	Kota Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
152	SMA Muh. 1 Yogyakarta	Jl. Gotong Royong II, Petinggen Karangwaru	Kota Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
153	SMAN 1 Blitar	Jl. A. Yani No. 94	Kota Blitar	Jawa Timur
154	SMAN 5 Malang	Jl. Tanimbar No. 24 Malang, Kel. Kasin	Kota Malang	Jawa Timur
155	SMA Katolik St. Albertus	Jl. Talang 1, Oro-Oro Dowo	Kota Malang	Jawa Timur
156	SMAN 1 Pacitan	Jl. Letjend Suprpto No. 49	Kab. Pacitan	Jawa Timur
157	SMAN 1 Bangil	Jl. Bader No. 03 Kalirejo	Kab. Pasuruan	Jawa Timur
158	SMAN 1 Pandaan	Jl. Dr. Sutomo	Kab. Pasuruan	Jawa Timur
159	SMAN 1 Krian Sidoarjo	Jl. Gub. Sunandar PS No. 5, Kraton	Kab. Sidoarjo	Jawa Timur
160	SMA Muh. 2 Surabaya	Jl. Pucang Anom 91	Kota Surabaya	Jawa Timur
161	SMAN 2 Modal Bangsa	Jl. Bandara S. Iskandar Muda Km. 12,5	Kab. Aceh Besar	NAD
162	SMAN 2 Banda Aceh	Jl. TWK Hasyim Banta Muda 08	Kota Banda Aceh	NAD
163	SMAN 1 Berastagi	Jl. Jamin Ginting No. 12	Kab. Karo	Sumatera Utara

164	SMAN 1 Tebing Tinggi	Jl. Kom.Yos Sudarso Tebing Tinggi	Kota Tebing Tinggi	Sumatera Utara
165	SMAN 1 Payakumbuh	Jl. Merapi No. 4 Tiakar	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat
166	SMA Cendana Rumbai	Kompleks Palam Rumbai	Kota Pekanbaru	Riau
167	SMAN 4 Lahat	Jl. Raya Tanjung Payang	Kab. Lahat	Sumatera Selatan
168	SMAN 1 Gadingrejo	Jl. Raya Tegalsari No. 001	Kab. Tanggamus	Lampung
169	SMAN 2 Bandar Lampung	Jl. Amir Hamzah Gotong Royong	Kota Bandar Lampung	Lampung
170	SMAN 2 Pontianak	Jl. R.E Martadinata	Kota Pontianak	Kalimantan Barat
171	SMAN 3 Jekan Raya	Jl. Tinggang Km 3.5	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah
172	SMA YPVDP	Komplek PT Badak NGL Bontang	Kota Bontang	Kalimantan Timur
173	SMAN 5 Balikpapan	Jl. Abdi Praja No. 119 Ring Road	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur
174	SMAN 1 Tarakan	Jl. KH. Dewantara Karang Balik No. 18	Kota Tarakan	Kalimantan Timur
175	SMAN 2 Palu	Jl. Tanjung Dako No. 9	Kota Palu	Sulawesi Tengah
176	SMAN 3 Palopo	Jl. Andi Djemma No. 52	Kota Palopo	Sulawesi Selatan
177	SMAN 1 Kendari	Jl. Mayjen Soetoyo No.102 Kendari	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara
178	SMAN 1 Bangli	Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 36	Kab. Bangli	Bali
179	SMAN 1 Ubud	Jl. Suweta-Sambahan	Kab. Gianyar	Bali
180	SMAN 1 Tabanan	Jl. Gunung Agung 122	Kab. Tabanan	Bali
181	SMAN 5 Denpasar	Jl. Sanitasi No. 2	Kota Denpasar	Bali
182	SMAN 2 Semarapura	Jl. Dewi Sartika	Kab. Klungkung	Bali
183	SMAN 1 Praya	Jl. Ki Hajar Dewantara 01	Kab. Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat
184	SMAN 2 Sumbawa Besar	Jl. Garuda No. 102	Kab. Sumbawa	Nusa Tenggara Barat
185	SMAN 1 Mataram	Jl. Pendidikan No. 21	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat
186	SMAN 3 Kupang	Jl. W J Lalamenteik, Oebobo	Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur
187	SMAN 3 Jayapura	Jl. Merah Putih Buper Waena	Kota Jayapura	Papua

188	SMAN 4 Curup	Jl. SMA 4 No. 3	Kab. Rejang Lebong	Bengkulu
189	SMAN 2 Kota Bengkulu	Jl. Mahoni No. 14 Kel. Padang Jati	Kota Bengkulu	Bengkulu
190	SMAN 1 Ternate	Jl. Ki Hajar Dewantara, Takoma	Kota Ternate	Maluku Utara
191	SMAN 1 Cisauk	Jl. Raya Serpong-Tangerang	Kab. Tangerang	Banten
192	SMAN 8 Tangerang	Jl. Besi Raya	Kota. Tangerang	Banten
193	SMAN 1 Manggar	Jl. Jenderal Sudirman	Kab. Belitung Timur	Bangka Belitung
194	SMAN 1 Pangkalpinang	Jl. Usman Ambon Kacang Pedang	Kota Pangkal Pinang	Bangka Belitung
195	SMAN 3 Gorontalo	Jl. Ki Hajar Dewantara No.43	Kota Gorontalo	Gorontalo
196	SMAN 1 Tanjung Pinang	Jl. Dr. Soetomo	Kota Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
197	SMAN 1 Sorong	Jl. Danau Toba No. 2, Kampung Baru	Kab. Sorong	Irian Jaya Barat
198	SMAN 2 Majene	Jl. Khairil Anwar No. 3	Kab. Majene	Sulawesi Barat

Pada SMA Bertaraf Internasional tahun 2006 dilanjutkan pembinaannya pada tahun 2007. Sasaran pembinaan adalah 200 sekolah. Namun yang telah terselenggara adalah 198 sekolah.

#### Daftar SMK Peserta Bimbingan Teknis SMK Bertaraf Internasional

No	Provinsi	Kab/Kota	Nama SMK	Program Keahlian Unggulan
1	Bali	Kota Denpasar	SMKN 1 Denpasar	Advanced Automotive
2	DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta	SMKN 2 Yogyakarta	Otomotif
3	Gorontalo	Kota Gorontalo	SMKN 2 Gorontalo	Perhotelan
4	Jawa Tengah	Kab. Salatiga	SMKN 2 Salatiga	Mekanik Otomotif
5	Jawa Tengah	Kabupaten Tegal	SMKN 1 Adiwerna Tegal	Mekanik otomotif
6	Jawa Timur	Kab. Malang	SMKN 1 Singosari	Advanced Automotive
7	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	SMKN 1 Pungging	Advanced Automotive
8	Jawa Timur	Kabupaten Tulungagung	SMKN 3 Boyolangu	Otomotif
9	Jawa Timur	Kota Malang	SMKN 3 Malang	Hotel dan Restoran
10	Jawa Timur	Kota Malang	SMKN 4 Malang	ICT/ TUK Grafika
11	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	SMKN 5 Banjarmasin	Otomotif
12	Kalimantan Timur	Kota Tarakan	SMKN 2 Tarakan	Otomotif
13	Kepulauan Riau	Kota Batam	SMKN 1 Batam	Otomotif
14	NTB	Kab. Lombok Barat	SMKN 2 Kuripan	Advanced Automotive
15	Papua	Kabupaten Mimika	SMKN 1 Mimika	Otomotif
16	Sulawesi Selatan	Kabupaten Tanah Toraja	SMKN 1 Makale	Otomotif
17	Sulawesi Selatan	Kota Makasar	SMKN 5 Makasar	Otomotif

18	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	SMKN 8 Makassar	Hotel dan Restoran
19	Sulawesi Tenggara	Kota Bau bau	SMKN 2 Bau-bau	Otomotif
20	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	SMKN 2 Buduran	Akuntansi
21	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	SMKN 3 Buduran	Konstruksi Kapal Baja
22	Jawa Timur	Kota Blitar	SMKN 1 Blitar	Plumbing
23	Jawa Timur	Kota Kediri	SMKN 1 Kediri	Mesin Perkakas
24	Jawa Timur	Kota Malang	SMK PGRI 3 Malang	ICT
25	Jawa Timur	Kota Surabaya	SMKN 1 Surabaya	ICT
26	Jawa Timur	Kota Surabaya	SMKN 5 Surabaya	Mesin Perkakas
27	Jawa Timur	Kota Surabaya	SMKN 11 Surabaya	ICT
28	Jawa Timur	Kota Ponorogo	SMKN 1 Jenangan	teknik Pemesinan
29	Jawa Timur	Kab. Pasuruhan	SMKN 1 Purwosari	ICT
30	Jawa Tengah	Kota Surakarta	SMKN 5 Surakarta	Mesin Perkakas
31	Jawa Tengah	Kabupaten Kudus	SMK Muh Kudus	Otomotif
32	Jawa Tengah	Kabupaten Sukoharjo	SMK Muh 1 Sukoharjo	Otomotif
33	Bali	Kabupaten Buleleng	SMKN 3 Singaraja	Mesin Perkakas
34	DI Yogyakarta	Kab. Bantul	SMKN 1 Bantul	ICT/Teknik Informatika
35	DI Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	SMKN 2 Wonosari	Mesin Perkakas
36	DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta	SMK Muh Giwangan	Mesin Perkakas
37	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat	SMKN 27 Jakarta	Hotel dan Restoran
38	DKI Jakarta	Kota Jakarta Selatan	SMKN 57 Jakarta	Hotel dan Restoran
39	DKI Jakarta	Kota Jakarta Utara	SMKN 33 Jakarta	ICT/Teknik Informatika
40	Irian Jaya Barat	Kota Sorong	SMKN 3 Sorong	Alat Berat
41	Jawa Barat	Kab. Cimahi	SMKN 1 Cimahi	ICT/Teknik Informatika
42	Jawa Barat	Kota Bandung	SMKN 6 Bandung	Teknik Mekanik Otomotif
43	Jawa Barat	Kota Cirebon	SMKN 1 Cirebon	Mesin Perkakas
44	Jawa Tengah	Kab. Banyumas	SMK Telkom Sandiputra	ICT/TKJ
45	Jawa Tengah	Kabupaten Semarang	SMK Tunas Harapan	ICT/TKJ
46	Jawa Tengah	Kota Surakarta	SMKN 2 Surakarta	ICT
47	Jawa Tengah	Kota Semarang	SMKN 7 Semarang	Advanced Automotive
48	Jawa Tengah	Kota Semarang	SMKN 11 Semarang	ICT/ TUK Grafika
49	Jawa Tengah	Kota Semarang	SMKN 4 Semarang	Mekanik Otomotif
50	Jawa Tengah	Kota Tegal	SMKN 3 Tegal	Advanced Automotive
51	Lampung	Kabupaten Lampung Tengah	SMKN 2 Terbanggi Besar	Otomotif
52	NTT	Kab. Ende	SMKN 2 Ende	Mesin Perkakas
53	Sulawesi Selatan	Kab. Palopo	SMKN 2 Palopo	Mesin Perkakas
54	Sulawesi Tenggara	Kota Kolaka	SMKN 2 Kolaka	Mesin Perkakas
55	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	SMKN 1 Balikpapan	Teknik Mekanik Otomotif
56	DKI Jakarta	Kota Jakarta Utara	SMKN 4 Jakarta	Advanced Automotive
57	Banten	Kabupaten Serang	SMKN 1 Serang	Otomotif

58	Banten	Kota Cilegon	SMKN 1 Cilegon	Otomotif
59	Jawa Tengah	Kab. Karanganyar	SMKN 2 Karanganyar	Mesin Perkakas
60	Jawa Tengah	Kab. Pati	SMK Tunas Harapan Pati	Mesin Perkakas
61	Jawa Tengah	Kabupaten Blora	SMKN 1 Blora	Mesin Perkakas
62	Jawa Tengah	Kabupaten Kebumen	SMKN 1 Gombang	Mesin Perkakas
63	Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	SMKN 3 Pangkalpinang	Hotel dan Restoran
64	Bengkulu	Kabupaten Rejang Lebong	SMKN 2 Curup	Mesin Perkakas
65	Bengkulu	Kota Bengkulu	SMKN 2 Bengkulu	Mesin Perkakas
66	Gorontalo	Kota Gorontalo	SMKN 3 Gorontalo	Mesin Perkakas
67	Jambi	Kota Jambi	SMKN 4 Jambi	Hotel dan Restoran
68	Jambi	Kota Jambi	SMKN 3 Jambi	Teknik Gambar Bangunan
69	Riau	Kota Dumai	SMK Taruna Persada	Otomotif
70	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	SMKN 3 Tanjung Pinang	Mesin Perkakas
71	Maluku	Kota Ambon	SMKN 3 Ambon	Mesin Perkakas
72	Maluku Utara	Kota Ternate	SMKN 2 Ternate	Mesin Perkakas
73	NAD	Kota Langsa	SMKN 2 Langsa	Mesin Perkakas
74	Riau	Kota Pekanbaru	SMKN 2 Pekanbaru	Advanced Automotive
75	Riau	Kota Pekanbaru	SMKN 3 Pekanbaru	Hotel dan Restoran
76	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi	SMKN 1 Bukittinggi	Advanced Automotive
77	Sumatera Selatan	Kabupaten Lahat	SMKN 1 Lahat	Teknik Gambar Bangunan
78	Sumatera Selatan	Kabupaten Muara Enim	SMKN 2 Muaraenim	Teknik Las
79	Sumatera Selatan	Kota Palembang	SMKN 6 Palembang	Hotel dan Restoran
80	Sumatera Utara	Kabupaten Asahan	SMKN 2 Kisaran	Otomotif
81	Sumatera Utara	Kabupaten Binjai	SMK Tunas Pelita Binjai	Otomotif
82	Jawa Barat	Kota Bandung	SMKN 11 Bandung	Akuntansi
83	NAD	Kabupaten Bireuen	SMKN 1 Bireun	Otomotif
84	Sumatera Utara	Kab. Toba Samosir	SMKN 1 Balige	Otomotif
85	Sumatera Utara	Kota Medan	SMKN 8 Medan	Akomodasi Perhotelan
86	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi	SMKN 2 Bukittinggi	Akuntansi
87	Sumatera Barat	Kota Solok	SMKN 1 Solok	Akuntansi
88	Sumatera Selatan	Kota Palembang	SMKN 4 Palembang	ICT/TKJ
89	Sumatera Utara	Deli Serdang	SMKN 1 Percut Sei Tuan	Otomotif
90	Sumatera Utara	Kota Medan	SMK Teladan Medan	Mesin Perkakas
91	Bali	Kab. Gianyar	SMKN 2 Sukawati	Seni dan Kerajinan
92	DI Yogyakarta	Kabupaten Bantul	SMKN 2 Kasihan	Seni Musik Pertunjukan

93	DI. Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	SMKN 2 Pengasih	Advanced Automotive
94	DI. Yogyakarta	Kab. Muntilan	SMKS Pangudi Luhur	Perabot Kayu
95	DI. Yogyakarta	Kota Yogyakarta	SMKN 4 Yogyakarta	Hotel dan Restoran
96	Gorontalo	Kota Gorontalo	SMKN 1 Gorontalo	UJP (Tour & Travel)
97	Jawa Barat	Kota Bandung	SMKN 10 Bandung	Seni dan Kerajinan
98	Jawa Barat	Kota Bogor	SMKN 3 Bogor	UJP (Tour & Travel)
99	Jawa Tengah	Kab. Tegal	SMKN 2 Adiwerna	Kria Logam
100	Jawa Tengah	Kota Surakarta	SMKS Mikael	Mesin Perkakas
101	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap	SMKN 2 Cilacap	Mesin Perkakas
102	Jawa Tengah	Kabupaten Klaten	SMKN 2 Klaten	Mesin Perkakas
103	Jawa Tengah	Kota Surakarta	SMKN 8 Surakarta	Seni Karawitan
104	Jawa Timur	Kab. Pacitan	SMKN 1 Pacitan	Seni dan Kerajinan
105	Jawa Timur	Kab. Situbondo	SMKN 1 Panji	Akomodasi Perhotelan
106	Jawa Timur	Kabupaten Jombang	SMKN 1 Jombang	Akuntansi
107	Jawa Timur	Kota Jember	SMKN 1 Jember	Akuntansi
108	Jawa Timur	Kota Malang	SMKN 5 Malang	Kria Kayu
109	Kalimantan Barat	Kabupaten Pontianak	SMKN 1 Mempawah	Akuntansi
110	Lampung	Kota Bandar Lampung	SMKN 3 Bandar Lampung	Tata Busana
111	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	SMKN 1 Tidore	Penjualan
112	NAD	Kabupaten Aceh Tengah	SMKN 1 Takengon	Akuntansi
113	NAD	Kota Lhokseumawe	SMKN 4 Lhokseumawe	Seni dan Kerajinan
114	NTB	Kota Mataram	SMKN 4 Mataram	Hotel dan Restoran
115	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	SMKN 1 Kupang	UJP (Tour & Travel)
116	Papua	Kota Jayapura	SMKN 2 Jayapura	UJP (Tour & Travel)
117	Sumatera Selatan	Kab. OKI	SMKN 2 Kayu Agung	Seni dan Kerajinan
118	Sulawesi Tengah	Kota Palu	SMKN 3 Palu	ICT/Teknik Informatika
119	Sulbar	Kab Polewali	SMKN 1 Polewali	ICT/Multimedia
120	Jawa Tengah	Kota Magelang	SMKN 1 Magelang	Advanced Automotive
121	Bali	Kab. Bangli	SMKN 1 Bangli	Akuntansi
122	Bali	Kab. Jembrana	SMKN 1 Negara	Akuntansi
123	Banten	Kabupaten Pandeglang	SMKN 2 Pandeglang	Pertanian
124	Jawa Barat	Kab. Cianjur	SMKN 1 Pacet Cianjur	Pertanian
125	Jawa Barat	Kab. Cirebon	SMKN 1 Mundu	Food Processing Packaging
126	Jawa Barat	Kab. Garut	SMKN 2 Tarogong	Advanced Automotive
127	Jawa Barat	Kab. Kuningan	SMKN 3 Kuningan	Otomotif
128	Jawa Barat	Kab. Subang	SMKN 2 Subang	Pertanian
129	Jawa Barat	Kota Bandung	SMKN 7 Bandung	Analisis Kimia
130	Jawa Barat	Kota Bandung	SMKN 13 Bandung	Analisis Kimia
131	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	SMKN 1 Cibadak	Teknologi Hasil Pertanian
132	Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	SMKN 2 Tasikmalaya	Otomotif

133	Jawa Tengah	Kab. Boyolali	SMKN 1 Mojosongo	Teknologi Hasil Pertanian
134	Jawa Tengah	Kab. Jepara	SMKN 1 Jepara	Food Processing Packaging
135	Jawa Tengah	Kab. Temanggung	SMKN 1 Temanggung	Food Processing Packaging
136	Jawa Tengah	Kabupaten Klaten	SMKN Trucuk	Pertanian
137	Jawa Timur	Kab. Gresik	SMKN 1 Cerme	Analisis Kimia
138	Jawa Timur	Kab. Jember	SMKN 1 Sukorambi	Food Processing Packaging
139	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	SMKN 2 Ketapang	Food Processing Packaging
140	Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	SMKN 1 Tanjung	Sekretaris
141	Kalimantan Timur	Kota Bontang	SMKN 1 Bontang	Kimia Industri
142	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	SMKN 1 Samarinda	UJP (Tour & Travel)
143	Lampung	Kota Metro	SMKN 2 Metro	Food Processing Packaging
144	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	SMKN 1 Pinrang	Akuntansi
145	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	SMKN 4 Makassar	UJP (Tour & Travel)
146	Sulawesi Tengah	Kota Palu	SMKN 1 Palu	Tata Busana
147	Sulawesi Utara	Kota Manado	SMKN 3 Manado	Hotel dan Restoran
148	Sumatera Barat	Kota Padang	SMKN 6 Padang	Hotel dan Restoran
149	Sumatera Utara	Kabupaten Simalungun	SMKN 1 Raya	Pertanian
150	Jawa Barat	Kota Bandung	SMKN 9 Bandung	Hotel dan Restoran
151	Bali	Kota Denpasar	SMKN 3 Denpasar	Perhotelan
152	Banten	Kota Tangerang	SMKN 3 Kota Tangerang	Tata Busana
153	DKI Jakarta	Kota Jakarta Selatan	SMKN 6 Jakarta	Akuntansi
154	DKI Jakarta	Kota Jakarta Selatan	SMKN 20 Jakarta	Akuntansi
155	DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	SMK Paramita Jakarta	Akomodasi Perhotelan
156	Jawa Barat	Kota Ciamis	SMKN 1 Ciamis	Akomodasi Perhotelan
157	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	SMKN 1 Bawang	Bisnis & Manajemen
158	Jawa Tengah	Kab. Banyumas	SMKN 1 Purwokerto	Akuntansi
159	Jawa Tengah	Kab. Boyolali	SMKN 1 Boyolali	Akuntansi
160	Jawa Tengah	Kab. Tegal	SMKN 1 Slawi	Akuntansi
161	Jawa Tengah	Kabupaten Klaten	SMKN 3 Klaten	Perhotelan
162	Jawa Tengah	Kota Kendal	SMKN 2 Kendal	Perabot Kayu
163	Jawa Tengah	Kota Semarang	SMKN 6 Semarang	Hotel dan Restoran
164	Jawa Tengah	Kota Surakarta	SMKN 6 Surakarta	UJP (Tour & Travel)
165	Jawa Timur	Kab. Ngawi	SMKN 1 Ngawi	Sekretaris
166	Jawa Timur	Kab. Ponorogo	SMKN 1 Ponorogo	Akuntansi
167	Jawa Timur	Kab. Trenggalek	SMKN 1 Pogalan	Akuntansi
168	Jawa Timur	Kabupaten Bondowoso	SMKN 2 Bondowoso	Tata Busana
169	Jawa Timur	Kota Surabaya	SMKN 6 Surabaya	Hotel dan Restoran

170	Jawa Timur	Kota Surabaya	SMKN 8 Surabaya	Tata Kecantikan Rambut
171	Jawa Timur	Kota Surabaya	SMKN 10 Surabaya	UJP (Tour & Travel)
172	Kalimantan Tengah	Kabupaten Kotawaringin Barat	SMKN 1 Pangkalan Bun	Multimedia
173	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	SMKN 3 Palangkaraya	Akomodasi Perhotelan
174	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	SMKN 4 Balikpapan	Hotel dan Restoran
175	Maluku	Kota Ambon	SMKN 1 Ambon	UJP (Tour & Travel)
176	Papua	Kota Jayapura	SMKN 1 Jayapura	Hotel dan Restoran
177	Sulawesi Barat	Kab. Majene	SMKN 1 Majene	Tata Busana/Boga
178	Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng	SMKN 1 Soppeng	Tata Busana
179	Sulawesi Utara	Kota Bitung	SMKN 1 Bitung	Akuntansi